



**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2021**



Dikeluarkan Oleh :  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang  
TAHUN 2021

# KATA PENGANTAR

---

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 merupakan pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang selama tahun anggaran 2021. Penyusunan dokumen ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yang menjadi peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sudah tidak berlaku lagi. Sebagai perangkat daerah yang taat azas perencanaan pembangunan, keberadaan Dokumen Renja merupakan perpanjangan implementasi dari Dokumen Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan aspek strategis seperti program prioritas Kepala Daerah, Amanat Pencapaian SPM Pendidikan maupun pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kota Pangkalpinang yang sesuai dengan peraturan terkait. Dengan kata lain, seluruh program dan kegiatan yang tercantum di dalam Dokumen Renja Tahun 2021 sudah menterjemahkan program prioritas dan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah tersusun di dalam Renstra, khusus untuk tahun 2021.

Dokumen Renja ini memuat beberapa hal penting terkait program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2019 – 2023 dan RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021. Dokumen ini merupakan langkah awal yang nantinya menjadi dasar penentuan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota pangkalpinang, dan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sebagai penggerak motor pendidikan dan kebudayaan di Kota Pangkalpinang. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini juga menjadi

cerminan atas pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang untuk memajukan dunia pendidikan dan kebudayaan di Kota Pangkalpinang.

Di akhir penyusunan Dokumen Renja Tahun 2021 ini, kami mengucapkan Alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami selama penyusunan Renja ini serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ni. Semoga dokumen Renja ini dapat direalisasikan dengan baik, benar, penuh tanggungjawab dan menjadi alat penunjuk arah yang tepat bagi Dinas Pendidikan dan Kota Pangkalpinang dalam mengemban tugas memajukan Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pangkalpinang tercinta ini.

Pangkalpinang, Juli 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Pangkalpinang



Eddy Supriadi, M.Pd.

Pembina Tingkat I

Nip.196701272005011002

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
TAHUN 2019 .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	39
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	52
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	66
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	73
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	73
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	74
3.3. Program dan Kegiatan.....	76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	87

BAB V	PENUTUP .....	91
	5.1. Catatan - catatan Penting .....	91
	5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	95
	5.3. Rencana Tindak Lanjut .....	96
LAMPIRAN.....		97

# DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 .....	28
Tabel 2.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang .....	40
Tabel 2.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	48
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.....	92
Tabel T.C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2019 Kota Pangkalpinang .....	10
Tabel T.C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Pangkalpinang .....	53
Tabel T.C 32	Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Pangkalpinang .....	68
Tabel T.C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dan Prakiraan maju Tahun 2021 Kota Pangkalpinang .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat menjadi Renja Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari penjabaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2019 – 2023. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Renja wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2021. Renja merupakan penterjemahan dari program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 – 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2019–2023 dan secara otomatis menyesuaikan dengan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan Renja dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang yang menjadi koordinator perencanaan di Kota Pangkalpinang dan juga dengan para pemangku kepentingan. Merujuk pada pasal 16 (enam belas) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. penetapan.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen yang secara substansial menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Adapun visi Kota Pangkalpinang untuk tahun 2019 – 2023 adalah **“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur)”**. Adapun visi yang didukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yaitu pada visi unggul, melalui misi ketiga dan keempat yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *good governance*”** dan **“Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan”**.

Adapun untuk **tahun 2021, Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang** difokuskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2020, dengan menitikberatkan kepada **“Pembangunan pemerataan infrastruktur, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pendidikan berkualitas dan kesehatan murah dan terjangkau”**. Sebagai komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam hal pemenuhan hak dasar warga negara khususnya di bidang pendidikan, pembangunan bidang pendidikan tetap mendapat sisi prioritas. Hal ini dikarenakan pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan mempunyai makna yang luas, tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan tapi juga harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam mencapai pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, berbagai upaya dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan formal, peningkatan kualitas kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kualitas pendidikan formal maupun nonformal. Strategi inilah yang kemudian menjadi

dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam memperkuat pondasi dasar Pendidikan di Kota Pangkalpinang.

Sebagai eksekutor kebijakan Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsi yang mendukung prioritas pembangunan terkait peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan daya saing dan pelestarian budaya daerah. Beberapa tantangan yang harus diselesaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, dimana salah satunya adalah menyediakan akses pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama bagi seluruh penduduk usia sekolah di Kota Pangkalpinang yang belum terlayani, selain itu juga meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pada bidang kebudayaan, tantangan utama yang harus diselesaikan adalah upaya untuk mengembangkan dan melindungi cagar budaya daerah, mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah, melestarikan sejarah dan tradisi budaya daerah, serta melestarikan budaya melayu melalui event khusus terkait hal dimaksud.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2021, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun ketiga Renstra. Dengan adanya dokumen Renja, pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga pencapaian terhadap visi misi Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu, penyusunan Renja Tahun 2021 juga bertujuan untuk melengkapi rangkaian penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021, dimana Renja organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bagian penting yang terkandung di dalamnya. Renja Tahun 2021 memuat uraian detail program – program dan kegiatan yang direncanakan akan direalisasikan di tahun 2021 sesuai dengan proyeksi kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, sebagai upaya mendukung kesuksesan pelaksanaan program-program prioritas kepala daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk tahun 2021.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 meliputi bagian – bagian sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
	1.1 latar belakang
	1.2 landasan hukum
	1.3 maksud dan tujuan, dan
	1.4 sistematika penulisan
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019
	1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD
	1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	1.2 Tujuan dan sasaran Renja
	1.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA**

### **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

### **TAHUN 2019**

---

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencantumkan pembahasan atas Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 2020. Untuk itu pada bagian ini dijabarkan hasil kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019, dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020) dengan mengacu pada APBD tahun 2020. Hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam renja – renja tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2019 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau realisasi APBD untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pokok-pokok materi yang akan dirangkum dalam tabel yang akan dijabarkan setelah ini memuat poin – poin diantaranya :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Keenam uraian di atas dijabarkan dalam tabel T.C 29 berikut ini :

Tabel T.C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kota Pangkalpinang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan							
					Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	Rp	Rp	K	Rp		
0	0	1			100%	10.346.227.785	100%	1.973.329.357	45,36%	1.882.261.487	95,39%	95,39%			45%	1.882.261.487	40%	15%		
0	0	1	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	2.206.282.285	12	407.117.357	12	341.665.689	100,00%	83,92%	12	383.850.000	24	341.665.689	40,00%	15,49%
0	0	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60	Bulan	4.320.000.000	12	817.740.000	12	818.765.000	100,00%	100,13%	12	929.975.000	24	818.765.000	40,00%	18,95%
0	0	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60	Bulan	377.000.000	12	76.025.000,00	12	75.227.500	100,00%	98,95%	12	81.500.000	24	75.227.500	40,00%	19,95%
0	0	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	40	Jasa	185.000.000	4	25.000.000,00	4	23.135.000	100,00%	92,54%	4	17.500.000	8	23.135.000	20,00%	12,51%
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	Bulan	230.465.500	12	37.038.500,00	12	36.110.500	100,00%	97,49%	12	33.175.000	24	36.110.500	40,00%	15,67%
0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	179.730.000	12	27.865.000,00	12	27.224.250	100,00%	97,70%	12	21.885.000	24	27.224.250	40,00%	15,15%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan									
						Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023								
0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	60	Jenis	75.000.000	25	24.883.500,00	25	15.080.500	100,00 %	60,60 %	25	8.170.000	50	15.080.500	83,33 %	20,11 %		
0	0	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4	Jenis	587.750.000	3	106.000.000,00	3	105.400.000	100,00 %	99,43 %	0	0	3	105.400.000	75,00 %	17,93 %		
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bulan	25.000.000	12	5.000.000,00	12	0	100,00 %	0,00 %	0	0	12	-	20,00 %	0,00 %		
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	60	Bulan	110.000.000	12	26.660.000,00	12	26.660.000	100,00 %	100,00 %	12	15.000.000	24	26.660.000	40,00 %	24,24 %		
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	60	Bulan	2.050.000.000	12	420.000.000,00	12	412.993.048	100,00 %	98,33 %	12	245.000.000	24	412.993.048	40,00 %	20,15 %		
													100,00 %	84,46 %							43,48 %	16,38 %
0	0	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>100%</b>	<b>3.901.545.003</b>	<b>100 %</b>	<b>880.399.640</b>	<b>75%</b>	<b>841.069.823</b>	<b>75%</b>	<b>95,53 %</b>		<b>75 %</b>	<b>841.069.823</b>	<b>75%</b>	<b>21,56 %</b>		
0	0	2	140	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK(Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Jumlah jenis peningkatan pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK	5	Jenis	1.188.000.000	4	100.000.000,00	4	96.070.500	100%	96,07 %	4	479.781.700	8	96.070.500	160,00 %	8,09 %		
0	0	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	23	unit	1.086.000.000	23	448.806.790,00	23	446.200.000	100%	99,42 %	0	0	23	446.200.000	100,00 %	41,09 %		
0	0	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	13	Jenis	185.000.003	2	57.000.000,00	2	56.350.000	100%	98,86 %	2	8.507.000	4	56.350.000	30,77 %	30,46 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019							Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan						
						Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)					Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023				
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	60	Bulan	867.450.000	12	172.215.100,00	12	171.500.000	100%	99,58 %	12	37.961.200	24	171.500.000	40,00 %	19,77 %	
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	60	Bulan	575.095.000	12	102.377.750,00	12	70.949.323	100%	69,30 %	12	136.160.000	24	70.949.323	40,00 %	12,34 %	
													100,00 %	92,65 %					92,69 %	27,94 %	
1	3			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					135.000.000,00	110	134.883.750	100%	99,91 %								
1	3	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibuat	550	stel	537000000	110	135.000.000,00	110	134.883.750	100%	99,91 %	0	0	110	134.883.750	20,00 %	25,12 %	
													100%	99,91 %					20%	25,12 %	
0	0	5		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				100%	360.000.000	100 %	185.000.000	0%	179.492.017	97%	97,02 %			0%	179.492.017	0%	49,86 %
0	0	5	150	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	jumlah berkas perhitungan Penetapan Angka kredit yang dinilai	575	berkas	453.084.000	900	85.000.000	900	80.200.000	100,00 %	94,35 %	900	32.500.000	1800	80.200.000	313,04 %	17,70 %	
0	0	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	25	Orang	360.000.000	15	100.000.000,00	15	99.292.017	100,00 %	99,29 %	0	0	15	99.292.017	60,00 %	27,58 %	
													100%	99,29 %					60%	27,58 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan								
					Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023						
0	0	6			100%	4.965.864.237	100%	916.914.237		836.576.620	91%	91%				836.576.620		16,85%		
0	0	6	32	Pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Buku pendataan pendidikan yang disusun	4	Buku	1.395.000.000	4	315.000.000	1	311.535.862	25,00%	98,90%	1	188.300.000	2	311.535.862	50,00%	22,33%
0	0	6	33	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	5	Dokumen	991.100.000	2	115.000.000	2	115.000.000	100,00%	100,00%	2	91.577.000	4	115.000.000	80,00%	11,60%
0	0	6	35	Bimtek Penatausahaan Keuangan sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penatausahaan keuangan sekolah	110	Sekolah	662.589.237	76	157.589.237,00	76	125.358.700	100,00%	79,55%	35	121.653.575	111	125.358.700	100,91%	18,92%
0	0	6	34	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan yang disusun	6	Dokumen	1.857.850.000	5	319.000.000	4	274.357.058	80,00%	86,01%	1	79.621.000	5	274.357.058	83,33%	14,77%
0	0	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	5	Laporan	24.325.000	2	4.325.000,00	2	4.325.000	100,00%	100,00%	2	1.935.000	4	4.325.000	80,00%	17,78%
0	0	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	Laporan	35.000.000	1	6.000.000,00	1	6.000.000	100,00%	100,00%	1	2.200.000	2	6.000.000	40,00%	17,14%
											84%	80,64%						62%	14,65%	
1				Wajib																
1	1			Pendidikan																
1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				100%	83.713.364.000	100%	16.467.110.700	44936%	16.191.123.690	44936%	98,32%		44936%	16.191.123.690	44936%	19,34%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan				
									Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		
1	1	2	60	Pengelolaan GTK Dikdas	Waktu Pengelolaan GTK Dikdas	12	Bulan	81.337.650.000	12	13.611.221.700,00	12	13.493.402.000	100,00 %	99,13 %	12	13.632.630.850	24	13.493.402.000	200,00 %	16,59 %
1	1	2	56	Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan	240	orang	565.999.000	351	565.999.000,00	351	523.403.270	100,00 %	92,47 %	351	413.733.800	702	523.403.270	292,50 %	92,47 %
1	1	2	55	Pengembangan Mutu PTK dalam Pemanfaatan TIK	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK dalam pemanfaatan TIK	890	orang	799.600.000	48	69.600.000,00	46	66.000.000	95,83 %	94,83 %	40	129.116.000	86	66.000.000	9,66 %	8,25 %
1	1	2	58	Pengembangan Mutu PTK DIKDas	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK DIKDas	368	orang	384.140.000	368	434.140.000,00	368	424.513.500	100,00 %	97,78 %	368	650.796.600	736	424.513.500	200,00 %	110,51 %
1	1	2	59	Pengelolaan GTK PAUD	Waktu Pengelolaan GTK PAUD	12	Bulan	625.975.000	12	797.350.000,00	12	787.404.920	100,00 %	98,75 %	12	2.234.150.000	24	787.404.920	200,00 %	125,79 %
1	1	2	28	Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar PAUD	Jumlah GTK penerima peningkatan kualitas tenaga pengajar PAUD	0	Orang	0	521	988.800.000,00	521	896.400.000	100,00 %	90,66 %	521	1.171.200.000	1042	896.400.000	0,00 %	0,00 %
												99,31 %	95,60 %					112,77 %	44,20 %	
1	1	3	1	Program penyediaan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD, PNF dan Dikdas		100%		17.347.118.864	100 %	15.989.030.050	24%	14.327.372.672	24%	89,61 %			24 %	14.327.372.672	24%	82,59 %
1	1	3	0	Pengembangan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengembangan mutu layanan pendidikan non formal	64	Lembaga	732.450.000	64	252.050.000,00	0	182.267.680	0,00 %	72,31 %	0	0	0	182.267.680	0,00 %	24,88 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan						
						Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)
1	1	3	7	1	jenis	400.000.000	1	470.000.000,00	1	452.783.500	100,00 %	96,34 %	1	348.664.000	2	452.783.500	200,00 %	113,20 %
1	1	3	20	33	ruang	225023016	6	607.478.004,00	6	599.035.000	100,00 %	98,61 %	2	32.071.000	8	599.035.000	24,24 %	266,21 %
1	1	3	21	10	ruang	531873100	2	531.873.100,00	2	437.244.581	100,00 %	82,21 %	0	0	2	437.244.581	20,00 %	82,21 %
1	1	3	22	24	ruang	1941129332	4	1.667.085.733,94	4	1.607.306.289	100,00 %	96,41 %	12	54.380.300	16	1.607.306.289	66,67 %	82,80 %
1	1	3	39	98	Lembaga	425.000.000	98	548.600.000,00	98	539.877.425	100,00 %	98,41 %	4	448.825.000	102	539.877.425	104,08 %	127,03 %
1	1	3	28	108	Sekolah	1.040.128.000	107	1.220.810.000,00	25	1.200.430.880	23,36 %	98,33 %	6	952.241.315	31	1.200.430.880	28,70 %	115,41 %
1	1	3	29	4	Jenis	1.420.600.000	2	1.814.350.000,00	1	1.516.325.050	50,00 %	83,57 %	6	1.485.034.000	7	1.516.325.050	175,00 %	106,74 %
1	1	3	8	44	ruang	651874783	2	225.023.016,00	1	123.142.500	50,00 %	54,72 %	2	14.066.700	3	123.142.500	6,82 %	18,89 %
1	1	3	11	6	Jenis	4.240.089.850	3	2.018.379.332,73	0	1.905.916.116	0,00 %	94,43 %	12	66.216.000	12	1.905.916.116	200,00 %	44,95 %
1	1	3	34	108	Sekolah	1.994.226.000	107	1.981.089.000,00	107	1.904.274.600	100,00 %	96,12 %	0	0	107	1.904.274.600	99,07 %	95,49 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan							
						Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023					
		Pendidikan Dasar																		
1	1	31	35	Pengembangan Mutu Layanan Kelembagaan dan Sarana PAUD	penilaian pendidikan dasar	98	Lembaga	120.000.000	98	253.854.000,00	98	242.454.070	100,00 %	95,51 %	97	114.186.000	195	242.454.070	198,98 %	202,05 %
1	1	31	30	Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Jumlah jenis pengadaan sarana belajar SMP	23	Jenis	2.616.910.000	9	1.784.408.980,00	0	1.554.391.340	0,00 %	87,11 %	10	37.905.000	10	1.554.391.340	43,48 %	59,40 %
1	1	31	32	Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK FISIK)	Jumlah prasarana Belajar SKB yang direhabilitasi	2	unit	355.940.000	2	355.940.000,00	2	350.349.999	100,00 %	98,43 %	0	0	2	350.349.999	100,00 %	98,43 %
1	1	31	40	Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar	Jumlah jenis peningkatan mutu layanan sarana pendidikan dasar	0		Rp -	16	1.606.214.100,00	16	1.597.775.400	100,00 %	99,47 %	1	214.158.000	17	1.597.775.400	0,00 %	0,00 %
1	1	31	17	Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK FISIK)	Jumlah jenis pengadaan sarana belajar SD	1	Jenis	651.874.783,33	2	651.874.783,33	2	113.798.242	100,00 %	17,46 %	10	15.780.000	12	113.798.242	1200,00 %	17,46 %
													62,41 %	76,08 %			154,19 %	90,95 %		
1	1	32		Program pengembangan fungsi pelayanan KBM pendidikan non formal		100%		436.000.000	100 %	763.102.800	100%	753.020.654	100,00 %	98,68 %			100 %	753.020.654	100%	172,71%
1	1	32	0	Peningkatan fungsi pelayanan KBM di SKB Pangkalpinang	Jumlah layanan KBM di SKB	3	Layanan	436.000.000	3	763.102.800,00	3	753.020.654	100,00 %	98,68 %	3	538.182.400	6	753.020.654	200,00 %	172,71%
													100,00 %	98,68 %			200,00 %	172,71%		

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023									
1	1	3	3	Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD	100%	793.900.000	100%	435.350.000	56%	418.250.000	56%	96,07%	56%	418.250.000	56%	52,68%				
1	1	3	5	Manajemen BOP PAUD	Jumlah lembaga yang termonitoring dalam penggunaan BOP PAUD	97	lembaga	250.000.000	97	50.900.000,00	97	50.000.000	100,00%	98,23%	97	50.000.000	194	50.000.000	200,00%	20,00%
1	1	3	6	Pengelolaan Dana BOP di TKN Model Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Model	60	Bulan	82.525.000	12	47.050.000,00	12	47.050.000	100,00%	100,00%	12	43.800.000	24	47.050.000	40,00%	57,01%
1	1	3	7	Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3	60	Bulan	82.525.000	12	54.250.000,00	12	54.250.000	100,00%	100,00%	12	51.600.000	24	54.250.000	40,00%	65,74%
1	1	3	8	Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Rangkui Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Kec. Rangkui	60	Bulan	81.700.000	12	69.200.000,00	12	63.200.000	100,00%	91,33%	12	66.000.000	24	63.200.000	40,00%	77,36%
1	1	3	1	Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Tamansari Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN kec. Taman Sari	60	Bulan	90.100.000	12	57.650.000,00	12	57.650.000	100,00%	100,00%	12	54.000.000	24	57.650.000	40,00%	63,98%
1	1	3	2	Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1	60	Bulan	86.600.000	12	76.650.000,00	12	68.550.000	100,00%	89,43%	12	66.600.000	24	68.550.000	40,00%	79,16%
1	1	3	3	Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pangkal Balam	60	Bulan	32.000.000	12	26.300.000,00	12	24.200.000	100,00%	92,02%	12	24.600.000	24	24.200.000	40,00%	75,63%
1	1	3	4	Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2	60	Bulan	88.450.000	12	53.350.000,00	12	53.350.000	100,00%	100,00%	12	50.400.000	24	53.350.000	40,00%	60,32%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019							Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan							
					Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023						
											100,00 %	96,38 %					60,00 %	62,40 %		
1	1	34		Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)	100%	334.677.844.920	100 %	27.865.895.410	50%	23.000.595.162	50%	82,54 %			50 %	23.000.595.162	50%	6,87 %		
1	1	34	11	Manajemen BOS Dikdas	Jumlah sekolah yang termonitoring dalam pengelolaan Dana BOS jenjang Dikdas	108	Sekolah	475.000.000	107	100.000.000,00	107	98.510.000	100,00 %	98,51 %	107	100.000.000	214	98.510.000	198,15 %	20,74 %
1	1	34	1	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 1	60	Bulan	925.100.000	12	68.400.000,00	12	65.347.000	100,00 %	95,54 %	12	69.000.000,00	24	65.347.000	40,00 %	7,06 %
1	1	34	2	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 2 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 2	60	Bulan	978.000.000	12	72.300.000,00	12	71.350.000	100,00 %	98,69 %	12	76.300.000,00	24	71.350.000	40,00 %	7,30 %
1	1	34	3	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 3	60	Bulan	1.055.100.000	12	78.000.000,00	12	70.185.000	100,00 %	89,98 %	12	84.200.000,00	24	70.185.000	40,00 %	6,65 %
1	1	34	4	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 4 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 4	60	Bulan	1.149.800.000	12	85.000.000,00	12	85.000.000	100,00 %	100,00 %	12	88.200.000,00	24	85.000.000	40,00 %	7,39 %
1	1	34	5	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 5 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 5	60	Bulan	1.060.500.000	12	78.400.000,00	12	77.061.300	100,00 %	98,29 %	12	82.300.000,00	24	77.061.300	40,00 %	7,27 %
1	1	34	6	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 6 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 6	60	Bulan	857.800.000	12	63.400.000,00	12	63.240.000	100,00 %	99,75 %	12	71.800.000,00	24	63.240.000	40,00 %	7,37 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019										Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan					
				Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023								
1	1	3	7	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 7 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 7	60	Bulan	1.013.000.000	12	74.900.000,00	12	74.900.000	100,00 %	100,00 %	12	78.700.000,00	24	74.900.000	40,00 %	7,39 %
1	1	3	8	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 8 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 8	60	Bulan	811.800.000	12	60.000.000,00	12	59.847.000	100,00 %	99,75 %	12	55.700.000,00	24	59.847.000	40,00 %	7,37 %
1	1	3	9	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 9 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 9	60	Bulan	890.100.000	12	65.800.000,00	12	65.586.000	100,00 %	99,67 %	12	63.500.000,00	24	65.586.000	40,00 %	7,37 %
1	1	3	10	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 10 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN 10	60	Bulan	853.600.000	12	63.100.000,00	12	55.008.300	100,00 %	87,18 %	12	59.100.000,00	24	55.008.300	40,00 %	6,44 %
1	1	3	10	Pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 1	60	Bulan	374.550.000	12	22.100.000,00	12	19.970.000	100,00 %	90,36 %	12	16.600.000,00	24	19.970.000	40,00 %	5,33 %
1	1	3	10	Pengelolaan Dana BOS di SDN 2 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 2	60	Bulan	188.950.000	12	11.150.000,00	12	9.864.000	100,00 %	88,47 %	12	18.100.000,00	24	9.864.000	40,00 %	5,22 %
1	1	3	10	Pengelolaan Dana BOS di SDN 3 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 3	60	Bulan	679.600.000	12	40.100.000,00	12	27.117.000	100,00 %	67,62 %	12	9.750.000,00	24	27.117.000	40,00 %	3,99 %
1	1	3	10	Pengelolaan Dana BOS di SDN 4 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 4	60	Bulan	146.600.000	12	8.650.000,00	12	8.075.000	100,00 %	93,35 %	12	10.500.000,00	24	8.075.000	40,00 %	5,51 %
1	1	3	10	Pengelolaan Dana BOS di SDN 5 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 5	60	Bulan	196.800.000	12	11.600.000,00	12	11.536.000	100,00 %	99,45 %	12	10.100.000,00	24	11.536.000	40,00 %	5,86 %
1	1	3	10	Pengelolaan Dana BOS di SDN 6 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 6	60	Bulan	428.100.000	12	25.250.000,00	12	25.250.000	100,00 %	100,00 %	12	12.000.000,00	24	25.250.000	40,00 %	5,90 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan									
				Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023											
1	1	3	10	Pengelolaan Dana BOS di SDN 7 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 7	60	Bulan	178.800.000	12	10.550.000,00	12	10.438.000	100,00 %	98,94 %	12	40.700.000,00	24	10.438.000	40,00 %	5,84 %
1	1	3	10	Pengelolaan Dana BOS di SDN 8 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 8	60	Bulan	178.800.000	12	10.550.000,00	12	10.510.000	100,00 %	99,62 %	12	9.150.000,00	24	10.510.000	40,00 %	5,88 %
1	1	3	10	Pengelolaan Dana BOS di SDN 9 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 9	60	Bulan	121.350.000	12	7.150.000,00	12	7.150.000	100,00 %	100,00 %	12	9.800.000,00	24	7.150.000	40,00 %	5,89 %
1	1	3	11	Pengelolaan Dana BOS di SDN 10 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 10	60	Bulan	598.150.000	12	35.300.000,00	12	33.850.000	100,00 %	95,89 %	12	11.350.000,00	24	33.850.000	40,00 %	5,66 %
1	1	3	11	Pengelolaan Dana BOS di SDN 11 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 11	60	Bulan	234.850.000	12	13.850.000,00	12	13.850.000	100,00 %	100,00 %	12	29.450.000,00	24	13.850.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	11	Pengelolaan Dana BOS di SDN 12 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 12	60	Bulan	169.650.000	12	10.000.000,00	12	10.000.000	100,00 %	100,00 %	12	7.850.000,00	24	10.000.000	40,00 %	5,89 %
1	1	3	11	Pengelolaan Dana BOS di SDN 13 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 13	60	Bulan	138.200.000	12	8.150.000,00	12	8.150.000	100,00 %	100,00 %	12	13.450.000,00	24	8.150.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	11	Pengelolaan Dana BOS di SDN 14 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 14	60	Bulan	283.900.000	12	16.750.000,00	12	16.686.000	100,00 %	99,62 %	12	14.400.000,00	24	16.686.000	40,00 %	5,88 %
1	1	3	11	Pengelolaan Dana BOS di SDN 15 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 15	60	Bulan	580.550.000	12	34.250.000,00	12	34.100.000	100,00 %	99,56 %	12	19.000.000,00	24	34.100.000	40,00 %	5,87 %
1	1	3	11	Pengelolaan Dana BOS di SDN 16 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 16	60	Bulan	319.450.000	12	18.850.000,00	12	18.850.000	100,00 %	100,00 %	12	10.750.000,00	24	18.850.000	40,00 %	5,90 %

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan									
				Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023								
1	1	3	11	Pengelolaan Dana BOS di SDN 17 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 17	60	Bulan	195.100.000	12	11.500.000,00	12	10.571.900	100,00 %	91,93 %	12	12.800.000,00	24	10.571.900	40,00 %	5,42 %
1	1	3	11	Pengelolaan Dana BOS di SDN 18 Pangkalpinang	Pengelolaan Dana BOS di SDN 18	60	Bulan	157.500.000	12	9.300.000,00	12	9.286.000	100,00 %	99,85 %	12	11.350.000,00	24	9.286.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	11	Pengelolaan Dana BOS di SDN 19 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 19	60	Bulan	406.750.000	12	24.000.000,00	12	16.012.000	100,00 %	66,72 %	12	29.700.000,00	24	16.012.000	40,00 %	3,94 %
1	1	3	12	Pengelolaan Dana BOS di SDN 20 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 20	60	Bulan	479.600.000	12	28.300.000,00	12	28.300.000	100,00 %	100,00 %	12	10.150.000,00	24	28.300.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	12	Pengelolaan Dana BOS di SDN 21 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 21	60	Bulan	256.750.000	12	15.150.000,00	12	14.480.000	100,00 %	95,58 %	12	8.000.000,00	24	14.480.000	40,00 %	5,64 %
1	1	3	12	Pengelolaan Dana BOS di SDN 22 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 22	60	Bulan	245.850.000	12	14.500.000,00	12	13.946.000	100,00 %	96,18 %	12	9.200.000,00	24	13.946.000	40,00 %	5,67 %
1	1	3	12	Pengelolaan Dana BOS di SDN 23 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 23	60	Bulan	370.400.000	12	21.850.000,00	12	21.786.000	100,00 %	99,71 %	12	12.000.000,00	24	21.786.000	40,00 %	5,88 %
1	1	3	12	Pengelolaan Dana BOS di SDN 24 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 24	60	Bulan	316.100.000	12	18.650.000,00	12	18.650.000	100,00 %	100,00 %	12	8.950.000,00	24	18.650.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	12	Pengelolaan Dana BOS di SDN 25 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 25	60	Bulan	179.750.000	12	10.600.000,00	12	10.574.000	100,00 %	99,75 %	12	9.650.000,00	24	10.574.000	40,00 %	5,88 %
1	1	3	12	Pengelolaan Dana BOS di SDN 26 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 26	60	Bulan	216.850.000	12	12.800.000,00	12	12.671.500	100,00 %	99,00 %	12	16.550.000,00	24	12.671.500	40,00 %	5,84 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan									
				Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023								
1	1	3	12	Pengelolaan Dana BOS di SDN 27 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 27	60	Bulan	161.050.000	12	9.500.000,00	12	9.480.000	100,00 %	99,79 %	12	10.950.000,00	24	9.480.000	40,00 %	5,89 %
1	1	3	12	Pengelolaan Dana BOS di SDN 28 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 28	60	Bulan	488.950.000	12	28.850.000,00	12	28.850.000	100,00 %	100,00 %	12	26.700.000,00	24	28.850.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	12	Pengelolaan Dana BOS di SDN 29 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 29	60	Bulan	207.700.000	12	12.250.000,00	12	12.161.000	100,00 %	99,27 %	12	11.700.000,00	24	12.161.000	40,00 %	5,86 %
1	1	3	13	Pengelolaan Dana BOS di SDN 30 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 30	60	Bulan	295.700.000	12	17.450.000,00	12	17.120.000	100,00 %	98,11 %	12	17.250.000,00	24	17.120.000	40,00 %	5,79 %
1	1	3	13	Pengelolaan Dana BOS di SDN 32 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 32	60	Bulan	172.850.000	12	10.200.000,00	12	10.200.000	100,00 %	100,00 %	12	10.500.000,00	24	10.200.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	13	Pengelolaan Dana BOS di SDN 33 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 33	60	Bulan	298.300.000	12	17.600.000,00	12	17.600.000	100,00 %	100,00 %	12	35.950.000,00	24	17.600.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	13	Pengelolaan Dana BOS di SDN 35 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 35	60	Bulan	189.700.000	12	11.200.000,00	12	11.199.950	100,00 %	100,00 %	12	9.700.000,00	24	11.199.950	40,00 %	5,90 %
1	1	3	13	Pengelolaan Dana BOS di SDN 36 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 36	60	Bulan	182.200.000	12	10.750.000,00	12	10.750.000	100,00 %	100,00 %	12	20.900.000,00	24	10.750.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	13	Pengelolaan Dana BOS di SDN 37 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 37	60	Bulan	166.850.000	12	9.850.000,00	12	9.850.000	100,00 %	100,00 %	12	15.350.000,00	24	9.850.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	13	Pengelolaan Dana BOS di SDN 38 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 38	60	Bulan	169.650.000	12	10.000.000,00	12	9.650.000	100,00 %	96,50 %	12	34.900.000,00	24	9.650.000	40,00 %	5,69 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan									
				Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023												
1	1	3	13	Pengelolaan Dana BOS di SDN 39 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 39	60	Bulan	163.650.000	12	9.650.000,00	12	9.650.000	100,00 %	100,00 %	12	16.650.000,00	24	9.650.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	14	Pengelolaan Dana BOS di SDN 40 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 40	60	Bulan	188.200.000	12	11.100.000,00	12	10.972.000	100,00 %	98,85 %	12	10.300.000,00	24	10.972.000	40,00 %	5,83 %
1	1	3	14	Pengelolaan Dana BOS di SDN 41 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 41	60	Bulan	149.250.000	12	8.800.000,00	12	8.800.000	100,00 %	100,00 %	12	10.350.000,00	24	8.800.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	14	Pengelolaan Dana BOS di SDN 42 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 42	60	Bulan	267.050.000	12	15.750.000,00	12	15.706.000	100,00 %	99,72 %	12	10.650.000,00	24	15.706.000	40,00 %	5,88 %
1	1	3	14	Pengelolaan Dana BOS di SDN 43 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 43	60	Bulan	183.150.000	12	10.800.000,00	12	10.800.000	100,00 %	100,00 %	12	9.500.000,00	24	10.800.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	14	Pengelolaan Dana BOS di SDN 44 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 44	60	Bulan	192.800.000	12	11.400.000,00	12	10.869.000	100,00 %	95,34 %	12	9.450.000,00	24	10.869.000	40,00 %	5,64 %
1	1	3	14	Pengelolaan Dana BOS di SDN 45 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 45	60	Bulan	152.450.000	12	9.000.000,00	12	8.580.000	100,00 %	95,33 %	12	10.550.000,00	24	8.580.000	40,00 %	5,63 %
1	1	3	14	Pengelolaan Dana BOS di SDN 46 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 46	60	Bulan	193.100.000	12	11.400.000,00	12	11.290.000	100,00 %	99,04 %	12	11.000.000,00	24	11.290.000	40,00 %	5,85 %
1	1	3	14	Pengelolaan Dana BOS di SDN 47 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 47	60	Bulan	170.400.000	12	10.050.000,00	12	10.050.000	100,00 %	100,00 %	12	8.600.000,00	24	10.050.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	14	Pengelolaan Dana BOS di SDN 48 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 48	60	Bulan	290.650.000	12	17.150.000,00	12	16.797.000	100,00 %	97,94 %	12	10.750.000,00	24	16.797.000	40,00 %	5,78 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan									
				Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023											
1	1	3	14	Pengelolaan Dana BOS di SDN 49 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 49	60	Bulan	144.200.000	12	8.500.000,00	12	8.336.000	100,00 %	98,07 %	12	24.850.000,00	24	8.336.000	40,00 %	5,78 %
1	1	3	15	Pengelolaan Dana BOS di SDN 50 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 50	60	Bulan	161.950.000	12	9.550.000,00	12	9.550.000	100,00 %	100,00 %	12	8.250.000,00	24	9.550.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	15	Pengelolaan Dana BOS di SDN 51 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 51	60	Bulan	199.250.000	12	11.750.000,00	12	10.673.000	100,00 %	90,83 %	12	10.700.000,00	24	10.673.000	40,00 %	5,36 %
1	1	3	15	Pengelolaan Dana BOS di SDN 52 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 52	60	Bulan	264.400.000	12	15.600.000,00	12	15.600.000	100,00 %	100,00 %	12	10.000.000,00	24	15.600.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	15	Pengelolaan Dana BOS di SDN 53 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 53	60	Bulan	147.350.000	12	8.700.000,00	12	8.540.000	100,00 %	98,16 %	12	12.200.000,00	24	8.540.000	40,00 %	5,80 %
1	1	3	15	Pengelolaan Dana BOS di SDN 54 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 54	60	Bulan	150.000.000	12	8.850.000,00	12	8.850.000	100,00 %	100,00 %	12	19.150.000,00	24	8.850.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	15	Pengelolaan Dana BOS di SDN 55 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 55	60	Bulan	178.800.000	12	10.550.000,00	12	10.266.000	100,00 %	97,31 %	12	20.600.000,00	24	10.266.000	40,00 %	5,74 %
1	1	3	15	Pengelolaan Dana BOS di SDN 56 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 56	60	Bulan	156.000.000	12	9.200.000,00	12	9.063.900	100,00 %	98,52 %	12	7.300.000,00	24	9.063.900	40,00 %	5,81 %
1	1	3	15	Pengelolaan Dana BOS di SDN 57 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 57	60	Bulan	183.900.000	12	10.850.000,00	12	10.850.000	100,00 %	100,00 %	12	6.300.000,00	24	10.850.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	15	Pengelolaan Dana BOS di SDN 58 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 58	60	Bulan	176.250.000	12	10.400.000,00	12	10.400.000	100,00 %	100,00 %	12	10.400.000,00	24	10.400.000	40,00 %	5,90 %

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan									
				Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023								
1	1	3	16	Pengelolaan Dana BOS di SDN 60 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 60	60	Bulan	168.550.000	12	9.950.000,00	12	9.950.000	100,00 %	100,00 %	12	11.000.000,00	24	9.950.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	16	Pengelolaan Dana BOS di SDN 61 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 61	60	Bulan	195.100.000	12	11.500.000,00	12	11.500.000	100,00 %	100,00 %	12	11.150.000,00	24	11.500.000	40,00 %	5,89 %
1	1	3	16	Pengelolaan Dana BOS di SDN 62 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 62	60	Bulan	183.150.000	12	10.800.000,00	12	10.640.000	100,00 %	98,52 %	12	9.450.000,00	24	10.640.000	40,00 %	5,81 %
1	1	3	16	Pengelolaan Dana BOS di SDN 63 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 63	60	Bulan	138.950.000	12	8.200.000,00	12	8.087.500	100,00 %	98,63 %	12	8.450.000,00	24	8.087.500	40,00 %	5,82 %
1	1	3	16	Pengelolaan Dana BOS di SDN 64 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 64	60	Bulan	182.200.000	12	10.750.000,00	12	10.250.000	100,00 %	95,35 %	12	19.800.000,00	24	10.250.000	40,00 %	5,63 %
1	1	3	16	Pengelolaan Dana BOS di SDN 65 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 65	60	Bulan	161.950.000	12	9.550.000,00	12	9.550.000	100,00 %	100,00 %	12	10.400.000,00	24	9.550.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	16	Pengelolaan Dana BOS di SDN 66 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 66	60	Bulan	199.250.000	12	11.750.000,00	12	11.750.000	100,00 %	100,00 %	12	10.750.000,00	24	11.750.000	40,00 %	5,90 %
1	1	3	16	Pengelolaan Dana BOS di SDN 67 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 67	60	Bulan	182.200.000	12	10.750.000,00	12	10.740.000	100,00 %	99,91 %	12	16.850.000,00	24	10.740.000	40,00 %	5,89 %
1	1	3	16	Pengelolaan Dana BOS di SDN 68 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 68	60	Bulan	184.650.000	12	10.900.000,00	12	10.700.000	100,00 %	98,17 %	12	10.050.000,00	24	10.700.000	40,00 %	5,79 %
1	1	3	16	Pengelolaan Dana BOS di SDN 69 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 69	60	Bulan	164.600.000	12	9.700.000,00	12	9.700.000	100,00 %	100,00 %	12	11.650.000,00	24	9.700.000	40,00 %	5,89 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2023						Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan										
									Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023								
1	1	3	20	1	Pengelolaan Dana BOS APBN SDN	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS APBN SD	60	Bulan	206.876.164.608	12	17.239.680.384,00	12	14.223.069.219	100,00 %	82,50 %	12	19.239.949.878,00	24	14.223.069.219	40,00 %	6,88 %					
1	1	3	30	1	Pengelolaan Dana BOS APBN SMPN	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS APBN SMP	60	Bulan	106.865.580.312	12	8.905.465.026,00	12	7.114.446.593	100,00 %	79,89 %	12	10.302.850.183,00	24	7.114.446.593	40,00 %	6,66 %					
													96,10 %	93,27 %								38,44 %	5,67 %			
4	2	1	1		Program pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi		5	Jenis	735.000.000	5	1.617.000.000	500%	1.464.652.500	100,00 %	91%			500 %	1.464.652.500	100,00 %	199,27%					
4	2	1	0		Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Jenis Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman	1	Jenis	72.000.000	1	72.000.000,00	1	59.000.000	100%	82%	1	137.518.200	2	59.000.000	200,00 %	81,94%					
4	2	1	0		Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi	Jumlah Jenis Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi	1	Jenis	70.000.000	1	376.700.000,00	1	358.131.400	100%	95%	1	2.037.886.000	2	358.131.400	200,00 %	511,62%					
4	2	3	0		Pengembangan, pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah	Jumlah jenis pengembangan, pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah	1	Jenis	1.168.300.000	5	1.168.300.000,00	5	1.047.521.100	100%	90%	1	400.000.000	6	1.047.521.100	600,00 %	89,66%					
													100,00 %	88,89 %								500,00 %	341,61%			
													<b>RATA RATA CAPAIAN</b>												132,36 %	80,41%

Berdasarkan evaluasi atas pembuatan Tabel T.C 29, ditemukan kendala sulitnya menyangdingkan realisasi target dan capaian Tahun 2018, 2019 dan 2020. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dalam kurun waktu tersebut, dimana pada saat Tahun 2020, terdapat penggabungan beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sangat signifikan. Adapun penggabungan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan pertimbangan efektifitas dan fleksibilitas pelaksanaan program dan kegiatan maupun dari sisi evaluasinya. Selain itu, terdapat perbedaan indikator kinerja program dan kegiatan pada tahun-tahun tersebut.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan pelayanan pendidikan dan kebudayaan di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok sebagai **“menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan urusan bidang kebudayaan”**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Penetapan rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya pada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;

6. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengukuran atas kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan. Pengukuran dilakukan atas ketercapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Renstra, untuk kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pada akhirnya, akan diperoleh rasio capaian indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian indikator dimaksud. Berikut dijabarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2019 yang tergambar melalui tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	3	4	5	6			
1.	Tersedia dan terjangkau akses pendidikan bagi anak usia dini, PNF dan pendidikan dasar	1.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia dini(PAUD) (0-6 tahun)	Persen	50,36	50,6	100,5
		2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	Persen	105,93	102	97,81
2.	Tersedia dan terjangkau akses pendidikan bagi remaja dan orang dewasa putus sekolah	3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	Persen	2,03	2,51	123,64
3.	Tersedianya layanan pendidikan yang bermutu dan berwawasan lingkungan	4.	Prosentase Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia dini(PAUD)	Persen	75,00	97,80	130,40
		5.	Prosentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah	Persen	87,00	75,59	86,88

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6		
		Dasar (SD)				
		6. Prosentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	70,00	94,19%	134,52
		7. Prosentase satuan Pendidikan Anak Usia dini(PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang terakreditasi A	Persen	12,24	8,27	67,56
		8. Prosentase satuan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang terakreditasi A	Persen	56,36	48,74	84,70
		9. Jumlah sekolah hijau (adiwiyata) minimal tingkat propinsi	sekolah	6	4	75
4.	Meningkatnya efektifitas dan relevansi layanan pendidikan	10. Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	Persen	0,02	0,02	100
		11. Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	0,20	0,28	140
		12. Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD)	Persen	100	100	100
		13. Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	100	100	100
		14. Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Dasar (SD)	Persen	100	120,70	120,67
		15. Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	100	114,67	114,67

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6		
		16. Rata-rata Capaian SPM Pendidikan	Persen	68,50	99,44	145,16
5.	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	17. Prosentase Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) yang berkualifikasi S1/DIV	Persen	37,72	59,91	158,82
		18. Prosentase Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) yang bersertifikat pendidik	Persen	22,84	10,55	46,19
		19. Prosentase Guru Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang berkualifikasi S1/DIV	Persen	93,20	86,86	93,20
		20. Prosentase Guru Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bersertifikat pendidik	Persen	45,47	37,00	81,37
		21. Prosentase Hasil Uji Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nilai diatas 70	Persen	19,03	95,00	500
		22. Prosentase Hasil Uji Kompetensi Guru Pendidikan Dasar (DIKDAS) Nilai diatas 70	Persen	13,73	87,60	638,02
6	Terlestariannya budaya benda (cagar budaya)	23. Jumlah cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	jenis	10	10	100
7.	Berkembangnya budaya tak benda	24. Jumlah seni budaya yang dilestarikan	jenis	8	8	100

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4		5	6		
	(seni, sejarah dan tradisi)	25.	Jumlah sejarah dan tradisi yang dilestarikan	jenis	10	10	100
8.	Tersedianya sistem tatakelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima	26.	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100
		27.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	75	50,7%	67,6%
9.	Tersedianya SDM yang handal dalam menjamin layanan prima dan efisien	28.	Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	5,75	19,48	338,78
10.	Tersedianya data yang berkualitas dan dapat dipertanggung-jawabkan	29.	Prosentase lembaga pendidikan yang memiliki dan memanfaatkan TIK	Persen	100	100	100
		30.	Prosentase lembaga yang melaksanakan pendataan pendidikan	Persen	100	100	100
11.	Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.	31.	Prosentase pengelolaan dan pelaporan dana BOS /BOP	Persen	100	82,54	82,54

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menetapkan **11 (sebelas) sasaran strategis** dengan **31 (tiga puluh satu)** indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019. Berikut tingkat ketercapaian **11 (sebelas) sasaran strategis** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang selama tahun 2019.

## **Sasaran 1**

### **Tersedia dan terjangkau akses pendidikan bagi anak usia dini, PNF dan pendidikan dasar.**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur hasil capaian akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang di tahun 2019. Dukungan atau peran serta masyarakat pada capaian akses Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar, ikut menentukan ketercapaian indikator ini. Adapun indikator pendukung sasaran ini sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar PAUD (0-6 tahun) dengan target sebesar 50,36% dan realisasi sebesar 50,60% sehingga indikator ini sudah melewati target sebesar 0,50% dengan capaian sebesar 100,50%
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dengan target sebesar 105,93% dan realisasi capaian sebesar 102% sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 2,19% dengan capaian hanya mencapai 97,81%

Dari kedua indikator, rata-rata capaian untuk sasaran pertama ini sebesar 99,15%.

Adapun kedua indikator tersebut diupayakan melalui pelaksanaan Program Penyediaan Akses dan Peningkatan Mutu Layanan PAUD, PNF dan Dikdas.

## **Sasaran 2**

### **Tersedia dan terjangkau akses pendidikan bagi remaja dan orang dewasa putus sekolah.**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan akses pendidikan bagi remaja dan orang dewasa putus sekolah, yang lebih terfokus pada pendidikan Non Formal dan Informal. Untuk mencapai sasaran ini, telah ditentukan indikator pendukung yang menunjang sasaran dimaksud yaitu **Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan** dengan target sebesar 2,03%. Dengan realisasi capaian sebesar 2,51%, diperoleh capaian target melebihi 100% yaitu sebesar 123,64%. Angka capaian untuk sasaran ini melebihi angka 100% dikarenakan peserta didik pada jenjang ini tidak hanya berasal dari Kota Pangkalpinang saja, melainkan juga dari luar Kota Pangkalpinang. Keberadaan Kota Pangkalpinang sebagai pusat layanan jasa termasuk di bidang pendidikan menjadi magnet yang cukup ampuh guna menarik minat penduduk di luar Kota Pangkalpinang untuk berpartisipasi dalam pendidikan di Kota Pangkalpinang. Dukungan capaian indikator ini diupayakan melalui pelaksanaan Program Penyediaan Akses dan Peningkatan Mutu Layanan PAUD, PNF dan Dikdas

### **Sasaran 3**

#### **Tersedianya layanan pendidikan yang bermutu dan berwawasan lingkungan.**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan mutu layanan pendidikan dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai sasaran ini, telah ditentukan indikator pendukung yang menunjang sasaran dimaksud yaitu :

1. Prosentase Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia dini(PAUD) dengan target sebesar 75%. Realisasi capaian ini sebesar 97,80% dengan capaian target sebesar 130,40%.
2. Prosentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) dengan target sebesar 87% dimana realisasi capaian sebesar 75,59%. Dengan demikian indikator ini mengalami penurunan sebesar 13,12% dari target yang ditetapkan;
3. Prosentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama-(SMP) dengan target 70%. Indikator ini mengalami pencapaian sebesar 34,52% dari target yang ditetapkan dimana realisasi target ini sebesar 94,19%;
4. Prosentase satuan Pendidikan Anak Usia dini(PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang terakreditasi A. Dari target yang ditetapkan sebesar 12,24%, realisasi yang dicapai selama tahun 2019 ini sebesar 8,27% sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 32,44%;
5. Prosentase satuan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang terakreditasi A. Dari target yang ditetapkan sebesar 56,36%, realisasi pencapaiannya hanya mencapai sebesar 48,74% sehingga belum memenuhi target sebesar 15,30%;
6. Jumlah sekolah hijau (adiwiyata) minimal tingkat propinsi dengan target sebesar 6 sekolah hanya dicapai sebanyak 4 sekolah sehingga belum memenuhi target sebesar 25%.

### **Sasaran 4**

#### **Meningkatnya efektifitas dan relevansi layanan pendidikan**

Sasaran ini di tetapkan sebagai patokan untuk melihat efektifitas dan relevansi layanan pendidikan di Kota Pangkalpinang guna memenuhi kebutuhan pendidikan calon peserta didik. Untuk mencapai sasaran ini, indikator yang ditetapkan diantaranya :

1. Angka Putus Sekolah Dasar (SD) dengan target sebesar 0,02%. Untuk indikator sudah memenuhi target yang ditetapkan karena realisasi capaian pun sebesar 0,02%;
2. Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan target sebesar 0,20%. Indikator ini belum memenuhi target karena mengalami kenaikan realsiasi capaian sebesar 40% yang seharusnya menurun dari target yang ditentukan. Ini berarti ada

pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menuntaskan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP;

3. Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD) dengan target sebesar 100% dan realisasi capaian pun mencapai 100% sehingga indikator ini sudah memenuhi target yang ditetapkan;
4. Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan target sebesar 100% dan realisasi capaian pun mencapai 100% sehingga indikator ini sudah memenuhi target yang ditetapkan;
5. Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Dasar (SD) dengan target sebesar 100% dan realisasi target sebesar 120,70% sehingga melampaui target sebesar 20,70%. Pencapaian ini terjadi karena masih adanya siswa yang berasal dari luar Kota Pangkalpinang sehingga angka melanjutkan Siswa SD untuk Kota Pangkalpinang melebihi dari 100%;
6. Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan target sebesar 100% dan realisasi target sebesar 114,67% dimana capaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan bahkan sudah melebihi sebesar 14,67%;
7. Rata-rata Capaian SPM Pendidikan dengan target sebesar 68,50% namun untuk capaian SPM ini belum bisa dihitung karena pemenuhan SPM baru diterapkan pada tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2019 baru dilakukan pendataan saja.

Dukungan atas pencapaian sasaran ini dilakukan melalui Program Penyediaan Akses dan Peningkatan Mutu Layanan PAUD, PNF dan Dikdas.

## **Sasaran 5**

### **Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu.**

Sasaran ini ditetapkan dalam meningkatkan efektivitas dan relevansi mutu pendidikan yang harus ditunjang dengan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu. Untuk mencapai sasaran ini, telah ditentukan indikator pendukung yang menunjang sasaran dimaksud diantaranya :

1. Persentase guru PAUD, PNF yang berkualifikasi S1/DIV dengan target sebesar 37,72% dan realisasi capaian sebesar 59,91%, sehingga indikator ini sudah memenuhi bahkan melebihi target sebesar 58,82%;
2. Persentase guru PAUD, PNF yang bersertifikat pendidik dengan target sebesar 22,84% namun baru bisa dicapai sebesar 10,55% sehingga belum memenuhi target sebesar 53,81% ;
3. Persentase guru DIKDAS yang berkualifikasi S1/DIV dengan target 93,20% dengan capaian 86.86% sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 6,80%;

4. Persentase guru DIKDAS yang bersertifikat pendidik dengan target 45,47% namun baru dicapai sebesar 37% sehingga target yang ditetapkan belum terpenuhi sebesar 18,63%;
5. Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru PAUD nilai di atas 70 dengan target 19,03 sudah tercapai sebesar 95% yang berarti indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan;
6. Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru DIKDAS nilai di atas 70 dengan target sebesar 13,73% dengan capaian 87,60% sehingga indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan.

Rata-rata capaian keenam indikator di atas sebesar 252,93%. Secara keseluruhan rata-rata capaian target untuk sasaran ini melebihi 100%, namun masih terdapat indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan. Implementasi keenam indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## **Sasaran 6**

### **Terlestarinya budaya benda (cagar budaya dan permuseuman)**

Sasaran ini ditetapkan sebagai bentuk tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada urusan Kebudayaan. Budaya benda dan tak benda menjadi satu kesatuan sebagai aset daerah yang dinilai patut dijaga kelestariannya. Untuk mengukur sasaran ini, telah ditentukan indikator pendukung yaitu :

- Jumlah cagar budaya yang terregistrasi secara nasional

Capaian untuk sasaran ini pada tahun 2019 sebesar 100%. Untuk mencapai target indikator tersebut, pada tahun 2019 telah diupayakan pelaksanaan Program Pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseuma, seni budaya, sejarah dan tradisi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.617.000.000. Besaran alokasi tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman dengan alokasi dana sebesar Rp.72.000.000.

Dengan dilaksanakannya ketiga kegiatan tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) cagar budaya Kota Pangkalpinang yang telah diregistrasi akhirnya ditetapkan di tingkat Nasional. Penetapan cagar budaya yang sebelumnya diregistrasi tersebut merupakan langkah awal dalam mewujudkan upaya pemeliharaan atas aset daerah tersebut. Adapun pada tahun 2019, cagar budaya yang telah diregistrasi dan ditetapkan tersebut di antaranya :

1. Rumah Kolonial di Jalan Menteng No. 37;
2. Gereja Kathedral Santo Yoseph;
3. Gereja GPIB Maranatha;
4. Wilhelmina Park (Tamansari);

5. Menara Air Minum di Jalan Merdeka Nomor 1;
6. Masjid Jami' di Jalan Masjid Jami';
7. Museum Timah Indonesia;
8. Wisma Timah I;
9. Rumah Sakit Bakti Timah;
10. Rumah Residen di Jalan Merdeka Nomor 1.

## **Sasaran 7**

### **Berkembangnya budaya tak benda (seni, sejarah dan tradisi)**

Sasaran ini ditetapkan sebagai bentuk tanggungjawab Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada urusan Kebudayaan khususnya budaya tak benda menjadi satu kesatuan sebagai aset daerah yang dinilai patut dijaga kelestariannya. Untuk mengukur sasaran ini, telah ditentukan indikator pendukung yaitu :

1. Jumlah seni budaya yang dilestarikan
2. Jumlah sejarah dan tradisi yang dilestarikan

Capaian untuk sasaran ini pada tahun 2019 sebesar 100%. Untuk mencapai target indikator tersebut, pada tahun 2019 telah diupayakan pelaksanaan Program Pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseuma, seni budaya, sejarah dan tradisi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.617.000.000.

Sementara itu, ragam sejarah dan tradisi serta kesenian yang dilestarikan diantaranya seperti yang diuraikan di bawah ini :

#### Ragam Kesenian Kota Pangkalpinang yang Dilestarikan

1. Tari Sambut Pinang Sebelas;
2. Tari Campak;
3. Musik Dambus;
4. Dulmuluk;
5. Songkok Resam;
6. Tudung Saji;
7. Cual;
8. Hadrah.

#### Ragam Sejarah dan Tradisi Kota Pangkalpinang yang Dilestarikan

1. Tradisi Nganggung;
2. Telok Seroja;
3. 1 Muharram;
4. Maulid Nabi;

5. Isra Mi'raj;
6. Nuzulul Qur'an;
7. Pehcun;
8. Cengbeng;
9. Aqiqah;
10. Kong Ngian;
11. Betamat;
12. Ruahan.

### **Sasaran 8**

#### **Tersedianya sistem tatakelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima.**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur tingkat profesionalitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai eksekutor pelaksana program prioritas kepala daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan haruslah menjadi yang terdepan dalam hal memajukan dunia pendidikan dan aset kebudayaan di Kota Pangkalpinang. Salah satu target indikator sasaran ini adalah nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dengan nilai B. Realisasi untuk indikator ini berhasil mencapai target, namun indikator yang lain yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat hanya tercapai sebesar 50,7% sehingga rata-rata tingkat capaian kedua indikator ini sebesar 83,8%.

### **Sasaran 9**

#### **Tersedianya SDM yang handal dalam menjamin layanan prima dan efisien.**

Pada tahun 2019, capaian sasaran ini sebesar 338,78% yang diperoleh melalui capaian indikator Prosentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal. Besarnya capaian indikator ini dikarenakan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal meningkat dibandingkan target yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.185.000.000.

### **Sasaran 10**

#### **Tersedianya Data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.**

Sasaran ini didukung oleh dua indikator yaitu Prosentase Lembaga Pendidikan yang memiliki dan memanfaatkan TIK dan Prosentase Lembaga yang Melaksanakan Pendataan Pendidikan. Rata-rata capaian sasaran ini di tahun 2019 sebesar 100%, dengan Program pendukung yaitu Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan

dukungan anggaran secara khusus untuk sasaran ini sebesar Rp. 69.600.000. Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan Pengembangan Mutu PTK dalam Pemanfaatan TIK. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan angka melek teknologi para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di sekolah-sekolah, sehingga dalam pemanfaatan teknologi dapat lebih maksimal guna menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **Sasaran 11**

### **Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengawal penggunaan Dana BOS/BOP oleh satuan pendidikan yang mendapat bantuan Dana BOS/BOP, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Pencapaian sasaran ini di tahun 2019 sebesar 100%, dimana seluruh satuann pendidikan yang menjadi sasaran penerima Dana BOS/BOP dapat mengelola dana tersebut dengan baik dan akuntabel. Dukungan pencapaian sasaran ini diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD), dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.435.350.000 dan Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 27.865.895.410, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD).**

Alokasi anggaran untuk program ini disalurkan untuk membantu pembiayaan operasional PAUD Negeri di Kota Pangkalpinang. Untuk alokasi yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang, perhitungan penyaluran dana sebesar Rp. 50.000 untuk satu siswa, dengan total keseluruhan 585 siswa. Sedangkan untuk alokasi yang bersumber dari APBN, perhitungan penyaluran dana sebesar Rp. 600.000 untuk satu siswa, dengan total keseluruhan 703 siswa. Alokasi anggaran yang dibiayai oleh APBD disalurkan melalui kegiatan berikut:

1. Manajemen BOP PAUD;
2. Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Tamansari Pangkalpinang;
3. Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1 Pangkalpinang;
4. Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang;
5. Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2 Pangkalpinang;
6. Pengelolaan Dana BOP di TKN Model Pangkalpinang;
7. Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3 Pangkalpinang;
8. Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Rangkui Pangkalpinang.

#### **2. Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).**

Senada dengan BOP, alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD diperuntukkan untuk membantu pemenuhan biaya operasional SD Negeri dengan alokasi

sebesar Rp.50.000 untuk setiap siswa (total 18.299 siswa) dan SMP Negeri dengan alokasi sebesar Rp.100.000 untuk setiap siswa (total 7.093 siswa). Sementara alokasi yang bersumber dari dana APBN diperuntukkan untuk membantu biaya operasional sekolah SMP Negeri dengan besaran Rp. 1.000.000 untuk setiap siswa (total 7.032 siswa) dan siswa SD Negeri maupun swasta di Kota Pangkalpinang dengan jumlah Rp. 800.000 untuk setiap siswa (total 18.004 siswa).

Dari 31 indikator yang terdapat di 11 sasaran yang ditetapkan, ada 12 indikator yang belum memenuhi target yang berarti baru 61,29% pencapaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam Target Kinerja yang ditetapkan. Untuk indikator Kinerja Tahun 2019 ini secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, karena indikator yang terdapat pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023 berbeda dengan indikator yang terdapat pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013-2018.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat bergantung pada upaya penanganan atas faktor-faktor permasalahan kinerja pelayanan yang ada di tiap bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pangkalpinang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang sebagai berikut :

1. Bidang sekretariat;
2. Bidang Pembinaan Dikdas;
3. Bidang Pembinaan ketenagaan;
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
5. Bidang Kebudayaan.

Untuk memaksimalkan pencapaian atas kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan, perlu diidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul pada struktur organisasi di atas. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang dijabarkan melalui tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL(DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang	<p>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Bidang = 4</li> <li>- Jumlah Sekretariat =1</li> <li>- Jumlah Seksi/Subbag = 15</li> </ul> <p>PENDIDIKAN FORMAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah PAUD/TK Negeri = 8</li> <li>- Jumlah PAUD/TK Swasta = 89</li> <li>- Jumlah SD Negeri = 66</li> <li>- Jumlah SD Swasta = 20</li> <li>- Jumlah SMP Negeri = 10</li> <li>- Jumlah SMP Swasta = 14</li> <li>- Jumlah RA/BA Negeri = 0</li> <li>- Jumlah RA/BA Swasta = 7</li> <li>- Jumlah MI Negeri = 2</li> <li>- Jumlah MI Swasta = 4</li> <li>- Jumlah MTs Negeri = 1</li> <li>- Jumlah MTs Swasta = 2</li> </ul> <p>PENDIDIKAN NON FORMAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah PKBM Negeri = 1</li> <li>- Jumlah PKBM Swasta = 7</li> <li>- Jumlah LKP = 50</li> </ul> <p>KEBUDAYAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Sanggar Budaya = 66</li> <li>- Komunitas Film = 11</li> <li>- Paguyuban =21</li> <li>- Jumlah Cagar Budaya =</li> </ul>				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL(DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	36 - Jumlah Kesenian = 8 - Jumlah Tradisi = 32				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL(DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Index Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Undang-Undang ASN No. 3 Tahun 2014 Tentang ASN</li> <li>- Permenpan No. 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya</li> <li>- Permenpan No. 14 Tahun 2010 Tentang Penilik dan Angka Kreditnya</li> <li>- Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan publik</li> <li>- Minimnya SDM yang memiliki sertifikat sesuai kompetensi</li> <li>- Rasio pengawas tidak sebanding dengan jumlah sekolah binaan</li> <li>- Rasio penilik tidak sebanding dengan jumlah lembaga binaan</li> <li>- Rasio pamong seni dan budaya tidak sebanding dengan lembaga binaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemahaman dan Kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan</li> <li>- Kurangnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparat</li> <li>- Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi pengawas</li> <li>- Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi penilik</li> <li>- Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi pamong seni dan budaya</li> </ul>	<p><b>1. Sekretariat</b> Belum optimalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu (penilik, pengawas, pamong)</li> <li>2. Pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas pegawai</li> <li>3. Pemenuhan kompetensi sebagai syarat menduduki jabatan tertentu (pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Analis Perencanaan, Analis Keuangan)</li> <li>4. Layanan umum sesuai standar pelayanan</li> <li>5. Perekrutan pegawai pada jabatan tertentu belum sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam analisis jabatan</li> <li>6. Penatausahaan Keuangan Sekolah</li> <li>7. Penatausahaan Aset Sekolah</li> </ol>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL(DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Sarana prasarana SD dalam Kondisi Baik baru 86,31%</p> <p>Sarana prasarana SMP dalam Kondisi Baik baru 66,67%</p> <p>% Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal masih dibawah 80%</p> <p>% Akreditasi SD Minimal A baru 52,33%</p> <p>% Akreditasi SMP Minimal A baru 66,67%</p>	<p>Permendiknas No.24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana</p> <p>PP No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Akreditasi DIKDAS</p>	<p>1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia bidang Sarana Prasarana DIKDAS</p> <p>2. Validitas data kurang memadai</p> <p>3. Pemahaman Peraturan tentang sarana prasarana yang masih rendah</p> <p>Pemenuhan terhadap 28 Indikator Pelayanan Dasar Pendidikan</p> <p>Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan</p>	<p>1. Keterbatasan Lahan dalam pemenuhan sarana prasarana sesuai standar</p> <p>2. Minimnya peran serta masyarakat terhadap pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas</p> <p>Letak Geografis Wilayah Kota Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Propinsi</p> <p>Rendahnya manajemen Satuan Pendidikan</p>	<p><b>2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</b></p> <p>Belum optimalnya :</p> <p>8. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru</p> <p>9. Pembinaan karakter Peserta Didik</p> <p>10. Pengelolaan data PIP dan siswa kurang mampu</p> <p>11. Penyediaan dan Pengelolaan Dana BOS</p> <p>12. Capaian Kompetensi Siswa dalam Lomba-lomba</p> <p>13. Peningkatan Hasil USBN SD Mata pelajaran Matematika dari 54 menjadi 60</p> <p>14. Hasil UN SMP mata pelajaran Bahasa Inggris dari 55 menjadi 60 dan IPA dari 52 menjadi 60</p> <p>15. Pembinaan Penyusunan Dokumen Kurikulum DIKDAS</p> <p>16. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran DIKDAS</p> <p>17. Pengelolaan Penyelenggaraan Ujian DIKDAS</p> <p>18. Sumber Daya dalam melakukan analisis terkait Kurikulum dan Penilaian</p> <p>19. Pelayanan Perizinan Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan DIKDAS</p> <p>20. Pembinaan dalam persiapan Akreditasi</p> <p>21. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah</p> <p>22. Keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan DIKDAS</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL(DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang	Tingkat keterlayanan pendidikan PAUD dibawah 50 %  % lembaga PAUD yang terakreditasi Minimal A baru 10,88%  Implementasi kurikulum PNF belum dilaksanakan secara maksimal	APK PAUD  Akreditasi Sekolah  PP No.32 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan	23. Belum ada kebijakan yang mewajibkan Anak Usia dini mengikuti PAUD  24. Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan  25. Pembinaan lembaga PNF belum maksimal	26. Rendahnya kesadaran orang tua memasukkan anaknya ke lembaga PAUD 27. Lembaga PAUD kurang memiliki Program Unggulan  28. Rendahnya Manajemen Lembaga PAUD  29. Belum profesionalnya pengelolaan PNF	<b>3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</b> Belum optimalnya : 30. Pengelolaan penatausahaan administrasi dan keuangan di lembaga PAUD 31. Kompetensi tenaga pendidik dalam pengelolaan penilaian peserta didik 32. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana di lembaga PAUD/PNF 33. Keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD/PNF 34. Pembinaan dalam persiapan Akreditasi PAUD dan PNF 35. Pembinaan Penyusunan Dokumen Kurikulum PAUD dan PNF 36. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran PAUD dan PNF 37. Pelayanan Perizinan Pendirian dan Operasional Lembaga PAUD dan PNF 38. Pengelolaan dan Pembinaan Lembaga PAUD/PNF

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL(DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Kualifikasi Tenaga Pendidik PAUD 54,52%</p> <p>Kualifikasi Tenaga Pendidik SD 80,43%</p> <p>Kualifikasi Tenaga Pendidik SMP 92,85%</p> <p>Tenaga Pendidik PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik 14,32%</p> <p>Tenaga Pendidik SD yang memiliki Sertifikat Pendidik 42,85%</p> <p>Tenaga Pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik 46,86%</p> <p>Hasil Uji Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD dan DIKDAS masih dibawah nilai 70</p>	<p>Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru</p> <p>Permendikbud No.37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat sampai Tahun 2015</p> <p>Hasil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan</p>	<p>Kurangnya pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan</p> <p>Kualifikasi Tenaga Pendidik belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku</p> <p>1. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap Tenaga Pendidik dalam mengikuti Uji Kompetensi</p> <p>2. Belum maksimalnya pembinaan oleh Pejabat Fungsional</p>	<p>Adanya moratorium penerimaan CPNS Tenaga Pendidik</p> <p>Jumlah Formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbatas</p> <p>1. Rendahnya motivasi Tenaga Pendidik dalam memenuhi kompetensi yang ditetapkan</p> <p>2. Kemampuan Tenaga Pendidik dalam penggunaan TIK yang masih rendah</p>	<p><b>4. Bidang Pembinaan Ketenagaan</b></p> <p>Belum optimalnya :</p> <p>39. Analisis kebutuhan tenaga pendidik dan Kependidikan disatuan pendidikan</p> <p>40. Data pokok pendidikan dan Kebudayaan di Satuan Pendidikan serta lembaga Kebudayaan yang valid</p> <p>41. Pemenuhan Kualifikasi Tenaga Pendidik</p> <p>42. Pemenuhan Tenaga Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik</p> <p>43. Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta pelaku budaya</p> <p>44. Minat Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dalam mengikuti kegiatan PTK Berprestasi</p> <p>45. Pendayagunaan TIK (sarana pembelajaran dan bahan ajar) di Satuan Pendidikan</p>

Berbagai permasalahan yang diidentifikasi di atas merupakan salah satu bahan evaluasi dalam penentuan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan, lancar atau tidaknya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang per bidang sangat menentukan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, pencapaian visi misi Kepala Daerah terpilih melalui program strategisnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta berbagai target nasional lainnya yang dibebankan pencapaiannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain berhadapan dengan berbagai permasalahan di atas, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga dihadapkan dengan tantangan dan peluang berikut ini :

#### **1. Peluang**

- Letak Kota Pangkalpinang yang strategis sekaligus sebagai ibukota provinsi, menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai etalase pendidikan yang menjanjikan penduduk daerah lain yang berdekatan;
- Aksesibilitas transportasi yang baik, angkutan transportasi darat yang lancar, tersedianya lokasi pelabuhan dan bandara udara yang dekat dan terjangkau;
- Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi;
- Dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar dan peningkatan kemampuan teknologi para pendidik dan tenaga kependidikan.

#### **2. Ancaman**

- Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi, pelanggaran HAKI, penyalahgunaan internet dan lainnya;
- Rawannya peredaran narkoba, minuman keras dan sex bebas yang dapat merambah dan mempengaruhi anak usia sekolah sehingga sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan.

### **3. Kekuatan**

- Dukungan regulasi pendidikan.
- Sarana dan prasarana pendidikan yang selalu mengalami peningkatan.
- Motivasi guru untuk meningkatkan kualifikasi cukup tinggi.
- Meningkatnya jumlah guru yang telah tersertifikasi.
- Tersedianya pedoman pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.

### **4. Kelemahan**

- Belum maksimalnya penerapan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkeadilan;
- Komite Sekolah belum berfungsi dan berperan secara maksimal;
- Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) belum optimal;
- Sarana belajar beberapa sekolah belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal;

Keempat sisi yang dianalisis di atas diolah sedemikian rupa untuk mendorong keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan mengenali keempat aspek tersebut, akan lebih mudah bagi perangkat daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memilah dan memilih sisi mana yang hendak dijadikan prioritas ke depan.

Pengenalan isu permasalahan pada bidang perbidang yang menjadi struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pengidentifikasian atas 4 (empat) aspek kekuatan dan kelemahan perangkat daerah menjadi instrumen untuk menentukan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam upayanya mencapai Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun identifikasi atas faktor penghambat dan pendorong dimaksud dijabarkan pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.			
<b>URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>				
	<b>a. Program Peningkatan Akses dan Peningkatan Mutu Layanan PAUD dan PNF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gedung, sarana dan prasarana PAUD yang kurang memadai, rusak dan belum memenuhi standar sarana dan prasarana dalam standar nasional pendidikan</li> <li>- Publikasi dan Sosialisasi PAUD yang belum maksimal</li> <li>- Sarana dan prasarana pendidikan non formal (SKB) belum maksimal</li> <li>- Peningkatan Pengembangan Pendidikan Parenting</li> <li>- Kurikulum PAUD yang belum sempurna sesuai standar nasional pendidikan</li> <li>- Pendidikan kursus dan kelembagaan belum terkelola dengan baik</li> <li>- Pendidikan Kecakapan Hidup yang masih kurang di masyarakat</li> <li>- Kreatifitas Anak Usia Dini belum dikembangkan secara maksimal</li> <li>- Program Gugus dan Lembaga PAUD yang masih memiliki kekurangan</li> <li>- Sosialisasi Penyusunan Kurikulum KBK belum merata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran dana yang terbatas tidak mencukupi kebutuhan</li> <li>- Sumber Daya Manusia yang masih kurang</li> <li>- Kurangnya kepedulian masyarakat dalam meningkatkan perkembangan PAUD</li> <li>- Belum adanya aturan tentang Kewajiban anak Usia PAUD untuk mengikuti pendidikan di Lembaga PAUD</li> <li>- Terlambatnya informasi bantuan sosial pada lembaga pendidikan</li> <li>- Bantuan sosial yang belum merata dan masih bersifat selektif</li> <li>- Pengawasan lembaga pendidikan yang belum maksimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besarnya potensi anak didik kota pangkalpinang</li> <li>- Tersedianya fasilitas dan dana dari pemerintah</li> <li>- Adanya penghargaan terhadap kemajuan perkembangan PAUD</li> <li>- Adanya bantuan sosial dari pusat setiap tahun</li> <li>- Adanya penghargaan terhadap lembaga pendidikan yang terakreditasi.</li> </ul>

Visi: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>b. Program Peningkatan Akses dan Peningkatan Mutu Layanan DIKDAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gedung, sarana dan prasarana SD/SMP yang kurang memadai, rusak dan belum memenuhi standar sarana dan prasarana dalam nasional pendidikan</li> <li>- Siswa SD/MI dan SMP/MTs yang berasal dari keluarga miskin</li> <li>- Mental, Karakter, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SD belum terbina dengan maksimal</li> <li>- Kompetensi tenaga pendidik SD/MI yang belum merata</li> <li>- Kurikulum SMP/MTs yang belum tersosialisasi dengan baik</li> <li>- Masyarakat yang belum menamatkan SD</li> <li>- Masyarakat yang belum menamatkan SMP</li> <li>- Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal</li> <li>- Kurangnya Alat Praktek dan Peraga Siswa</li> <li>- Pengembangan kurikulum (TPK) KTSP SD</li> <li>- Peningkatan nilai UN SD/MI</li> <li>- Peningkatan nilai UN SMP/MTs</li> <li>- Peningkatan Prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD</li> <li>- Peningkatan Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD</li> <li>- Peningkatan Prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP</li> <li>- Peningkatan Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP</li> <li>- Peningkatan Prestasi Lomba Cerdas Cermat Siswa SD</li> <li>- Peningkatan Prestasi Lomba Cerdas Cermat Siswa SMP</li> <li>- Peningkatan Penulisan Karya Ilmiah Remaja</li> <li>- Peningkatan Prestasi Olimpiade Literasi</li> <li>- Pembinaan Kesiswaan Siswa SMP/MTs yang belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak sinkronnya Pendataan pada tingkat RT, RW, Kelurahan dan Sekolah</li> <li>- Belum terintegrasinya pembinaan antara Sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>- Kurangnya keterampilan dan motivasi tenaga pendidik dalam kegiatan pengembangan diri</li> <li>- Belum meratanya kesempatan pengembangan diri</li> <li>- Belum maksimal Kinerja KKG</li> <li>- Kurangnya peralatan TIK</li> <li>- Terbatasnya dana APBD Kota</li> <li>- Masih lemahnya kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kota dan sekolah</li> <li>- Masih terdapatnya nilai UN dibawah standar ketentuan kelulusan</li> <li>- Rendahnya kinerja kepala sekolah</li> <li>- Lemahnya administrasi di sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Bantuan siswa miskin bersumber APBD Kota, Provinsi dan Nasional</li> <li>- Besarnya potensi siswa yang berbakat di Kota Pangkalpinang</li> <li>- Tersedianya fasilitas dari pemerintah</li> <li>- Tersedianya dana dari pemerintah</li> <li>- Tersedianya wadah untuk pengembangan diri tenaga pendidik (LPMP)</li> <li>- Tersedianya alat peraga di pasaran</li> <li>- Tersedianya dana untuk pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui APBD Kota</li> <li>- Adanya kegiatan uji coba UN</li> <li>- Adanya pelajaran tambahan di sekolah</li> <li>- Adanya monev yang dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap kepala sekolah</li> <li>- Adanya siswa dari keluarga yang kurang mampu</li> <li>- Adanya penghargaan terhadap lembaga pendidikan yang terakreditasi.</li> </ul>

Visi: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajerial Kepala Sekolah TK/SD belum maksimal</li> </ul>		
	<p><b>c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pendidik PAUD berkualifikasi S1/DIV masih rendah</li> <li>- Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat Pendidik masih rendah</li> <li>- Jumlah Pendidik SD berkualifikasi S1/DIV masih rendah</li> <li>- Jumlah Pendidik SD yang memiliki sertifikat Pendidik masih rendah</li> <li>- Jumlah Pendidik SMP berkualifikasi S1/DIV masih rendah</li> <li>- Jumlah Pendidik SMP yang memiliki sertifikat Pendidik masih rendah</li> <li>- Kompetensi Pendidik PAUD masih rendah</li> <li>- Kompetensi Pendidik SD masih rendah</li> <li>- Kompetensi Pendidik SMP masih rendah</li> <li>- Pengembangan Kompetensi Tenaga Kebudayaan belum Optimal</li> <li>- Peningkatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan data yang tidak tepat waktu dari satuan pendidikan</li> <li>- Validitas data dari satuan pendidikan yang masih diragukan kebenarannya</li> <li>- Masih lemahnya system perencanaan terpadu dan berbasis kinerja di tingkat satuan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya operator sekolah yang menangani data</li> <li>- Tersedianya dana dan pelatihan bagi para operator</li> <li>- Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>- Tersedianya pelatihan evaluasi diri sekolah</li> <li>- Tersedianya narasumber dan petugas pendampingan dari pengawas sekolah</li> </ul>
	<p><b>d. Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian sejarah, nilai budaya, permuseuman, kesenian dan perfilman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan alokasi anggaran yang berorientasi pengembangan seni budaya dan sejarah daerah sehingga minimnya kegiatan pengenalan seni budaya dan sejarah daerah secara priodik ke tingkat nasional dan internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pemerintah daerah, dukungan para tokoh masyarakat, tokoh seni budaya dan para pelaku sejarah dan/atau sejarawan daerah untuk senantiasa melestarikan, menggalikembangkan dan mempopulerkan seni, budaya dan sejarah dan sejarah daerah</li> </ul>

Visi: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Misi 3 : <b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas Aparatur yang belum merata</li> <li>- Sarana prasarana Aparatur belum lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya upaya setiap pihak untuk memberikan pelayanan yang baik demi mewujudkan <i>Good Governance</i>.</li> </ul>

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 juga memperhatikan kesesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021. Hal ini dikarenakan Renja perangkat daerah merupakan penterjemahan pelaksanaan visi misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKPD sehingga harus terjalin kesesuaian/ kesinkronan satu sama lain. Berikut dijabarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 yang ditampilkan pada tabel T.C 31 berikut ini :

**Tabel T.C 31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kota Pangkalpinang**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
01.01	Pendidikan					37.811.523.883,00	Pendidikan				44.012.917.883,00
1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		<i>Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi OPD</i>	100	Persen	2.114.797.094,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi OPD</i>	100	Persen	2.114.797.094,00
1.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DIKBUD	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	397.850.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	397.850.000,00
1.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DIKBUD	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	925.175.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	925.175.000,00
1.01.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIKBUD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	10	Unit	179.612.150,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	10	Unit	179.612.150,00
1.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DIKBUD	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	78.002.706,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	78.002.706,00
1.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DIKBUD	Jumlah peralatan kerja yang mendapatkan perbaikan	3	Jenis	15.000.000,00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapatkan perbaikan	3	Jenis	15.000.000,00
1.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	DIKBUD	Jumlah waktu penyediaan ATK di OPD	12	Bulan	43.499.200,00	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu penyediaan ATK di OPD	12	Bulan	43.499.200,00
1.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DIKBUD	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	34.077.246,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	34.077.246,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DIKBUD	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000,00
1,01,01,14	Penyediaan peralatan rumah tangga	DIKBUD	Jumlah peralatan rumah yang dibeli	3	Jenis	33.662.900,00	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah yang dibeli	3	Jenis	33.662.900,00
1.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DIKBUD	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	5.600.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	5.600.000,00
1.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	DIKBUD	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai	12	Bulan	30.000.000,00	Penyediaan makanan	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai	12	Bulan	30.000.000,00
1.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	12	Bulan	250.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	12	Bulan	250.000.000,00
1,01,01,30	Penataan arsip perkantoran	DIKBUD	Jumlah waktu penataan arsip perkantoran	12	Bulan	46.007.892,00	Penataan arsip perkantoran	Jumlah waktu penataan arsip perkantoran	12	Bulan	46.007.892,00
1,01,01,31	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	DIKBUD				66.310.000,00	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah				66.310.000,00
<b>01.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>840.360.350,00</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>840.360.350,00</b>
1.01.02.00	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	DIKBUD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	Unit	10.000.000,00
1.01.02.07	Penyediaan Perlengkapan gedung kantor	DIKBUD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	1	Unit	27.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	1	Unit	27.500.000,00
1.01.02.09	Penyediaan peralatan gedung kantor	DIKBUD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	2	Unit	25.696.350,00	Penyediaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	2	Unit	25.696.350,00
1.01.02.22	Pemeliharaan gedung kantor	DIKBUD	Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor	12	Bulan	144.554.000,00	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor	12	Bulan	144.554.000,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
		DIKBUD	Tersedianya jasa penunjang untuk pemeliharaan gedung kantor	12	Bulan			Tersedianya jasa penunjang untuk pemeliharaan gedung kantor	12	Bulan			
		DIKBUD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan			
1.01.02.24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	DIKBUD	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	136.410.000,00	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	136.410.000,00		
1.01.02.24	Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK (teknologi informasi dan komunikasi)	DIKBUD	Jumlah sarana prasarana TIK dalam mendukung pelayanan (sarana)	2	Sarana	296.200.000,00	Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK (teknologi informasi dan komunikasi)	Jumlah sarana prasarana TIK dalam mendukung pelayanan (sarana)	2	Sarana	296.200.000,00		
			Jumlah waktu pengelolaan jaringan dan website OPD	4	Bulan				Jumlah waktu pengelolaan jaringan dan website OPD	4		Bulan	
			Jumlah waktu penyewaan VPS (virtual private server)	12	Bulan				Jumlah waktu penyewaan VPS (virtual private server)	12		Bulan	
			Jumlah waktu penyewaan domain web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah	12	Bulan				Jumlah waktu penyewaan domain web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah	12		Bulan	
			Jumlah waktu pemeliharaan server dan jaringan internet/internet Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	Bulan				Jumlah waktu pemeliharaan server dan jaringan internet/internet Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12		Bulan	
			Jumlah mesin absensi sekolah	11	Unit				Jumlah mesin absensi sekolah	11		Unit	
			Tersedianya aplikasi/sistem informasi berbasis TI	2	Sarana				Tersedianya aplikasi/sistem informasi berbasis TI	2		Sarana	
			Pengelolaan jaringan dan website OPD	4	Bulan		Pengelolaan jaringan dan website OPD	4	Bulan				
			Tersedianya VPS (virtual private server)OPD	12	Bulan		Tersedianya VPS (virtual private server)OPD	12	Bulan				

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
			Tersedianya domain dan subdomain OPD dan sekolah Terpeliharanya peralatan pendukung server dan jaringan internet sekolah/internet OPD Pengadaan mesin absensi sekolah	12	Bulan			Tersedianya domain dan subdomain OPD dan sekolah Terpeliharanya peralatan pendukung server dan jaringan internet sekolah/internet OPD Pengadaan mesin absensi sekolah	12	Bulan	
				12	Bulan				12	Bulan	
				11	Unit				11	Unit	
1.01.02.141	Pembangunan gedung kantor		jumlah gedung kantor yang dibangun	1	Unit	200.000.000,00	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun	1	Unit	200.000.000,00
<b>01.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>525.343.400,00</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>525.343.400,00</b>
1,01,05,85	Pengadaan pakaian dinas pegawai	DIKBUD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	110	stel	71.145.000,00	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	110	stel	71.145.000,00
1,01,05,93	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan	DIKBUD	Jumlah berkas perhitungan penetapan angka kredit yang dinilai Berkas PTK yang dihitung angka kredit	115 115	Berkas Berkas	89.047.400,00	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah berkas perhitungan penetapan angka kredit yang dinilai Berkas PTK yang dihitung angka kredit	115 115	Berkas Berkas	89.047.400,00
1.01.05.94	Pendidikan dan Pelatihan calon pengawas sekolah	DIKBUD	Jumlah calon pengawas sekolah yang mengikuti diklat	30	orang	365.151.000,00	Pendidikan dan Pelatihan calon pengawas sekolah	Jumlah calon pengawas sekolah yang mengikuti diklat	30	orang	365.151.000,00
<b>01.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Terlaksananya upaya peningkatan dan pengembangan atas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>10</b>	<b>Laporan</b>	<b>550.233.600,00</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terlaksananya upaya peningkatan dan pengembangan atas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>10</b>	<b>Laporan</b>	<b>550.233.600,00</b>
1,01,06,02	Penyusunan laporan semesteran keuangan	DIKBUD	Jumlah dokumen laporan semesteran keuangan yang disusun	1	Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan laporan semesteran keuangan	Jumlah dokumen laporan semesteran keuangan yang disusun	1	Dokumen	5.000.000,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1,01,06,04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	DIKBUD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	Dokumen	6.000.000,00	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	Dokumen	6.000.000,00
1,01,06,32	Pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan	DIKBUD	Jumlah jenis buku profil pendidikan dan kebudayaan yang disusun Jumlah jenis buku profil pendidik dan tenaga kependidikan yang disusun Jumlah jenis buku rangkuman pendidikan yang disusun Jumlah satuan pendidikan yang melakukan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan Tersedianya buku saku Pendidikan dan Kebudayaan	1 1 1 209 1	Jenis Jenis Jenis Satuan Pendidikan Jenis	201.136.600,00	Pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah jenis buku profil pendidikan dan kebudayaan yang disusun Jumlah jenis buku profil pendidik dan tenaga kependidikan yang disusun Jumlah jenis buku rangkuman pendidikan yang disusun Jumlah satuan pendidikan yang melakukan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan Tersedianya buku saku Pendidikan dan Kebudayaan	1 1 1 209 1	Jenis Jenis Jenis Satuan Pendidikan Jenis	201.136.600,00
1,01,06,33	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	DIKBUD	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang disusun	3	Jenis	100.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang disusun	3	Jenis	100.000.000,00
1,01,06,34	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan	DIKBUD	Jumlah jenis dokumen evaluasi perencanaan yang disusun	1	Jenis	100.000.000,00	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah jenis dokumen evaluasi perencanaan yang disusun	1	Jenis	100.000.000,00
1,01,06,35	Bimtek Penatausahaan Keuangan sekolah	DIKBUD	jumlah sekolah yang mengikuti bimtek	36	sekolah	138.097.000,00	Bimtek Penatausahaan Keuangan sekolah	jumlah sekolah yang mengikuti bimtek	36	sekolah	138.097.000,00
<b>1,01,20</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		<b>Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>			<b>23.393.408.203,00</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>			<b>23.393.408.203,00</b>
1.01.20.55	Pengembangan mutu PTK dalam	DIKBUD	Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan	40	Orang	149.999.800	Pengembangan mutu PTK dalam	Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan	40	Orang	149.999.800

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
	pemanfaatan TIK		pembelajaran berbasis TIK Jumlah guru SMP yang mengikuti pembelajaran berbasis TIK Guru SD yang terlatih memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas	40	Orang		pemanfaatan TIK	pembelajaran berbasis TIK Jumlah guru SMP yang mengikuti pembelajaran berbasis TIK Guru SD yang terlatih memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas	40	Orang	
			Guru SMP yang terlatih memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas	40	Orang			Guru SMP yang terlatih memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas	40	Orang	
1.01.20.56	Pengembangan mutu PTK PAUD,PNF dan Tenaga Kebudayaan	DIKBUD	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan jumlah Guru PAUD dan PNF yang dapat mengikuti lomba pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan keningkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)	110	Orang	485.822.503	Pengembangan mutu PTK PAUD,PNF dan Tenaga Kebudayaan	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan jumlah Guru PAUD dan PNF yang dapat mengikuti lomba pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan keningkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)	110	Orang	485.822.503
			Jumlah Guru PAUD Formal berprestasi keningkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)	3	Orang			Jumlah Guru PAUD Formal berprestasi keningkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)	3	Orang	
1.01.20.58	Pengembangan Mutu PTK DIKDAS	DIKBUD	Jumlah Calon Kepala Sekolah SD/SMP yang mengikuti diklat Jumlah PTK SD berprestasi yang mengikuti lomba	30	Orang	688.545.900	Pengembangan Mutu PTK DIKDAS	Jumlah Calon Kepala Sekolah SD/SMP yang mengikuti diklat Jumlah PTK SD berprestasi yang mengikuti lomba tingkat	30	Orang	688.545.900
				3	Orang				3	Orang	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
			tingkat lanjutan (minimal tingkat provinsi)					lanjutan (minimal tingkat provinsi)			
			Jumlah PTK SMP berprestasi yang mengikuti lomba tingkat lanjutan (minimal tingkat provinsi)	3	Orang			Jumlah PTK SMP berprestasi yang mengikuti lomba tingkat lanjutan (minimal tingkat provinsi)	3	Orang	
1.01.20.59	Pengelolaan GTK PAUD	DIKBUD	Jumlah GTK PAUD yang dikelola	31	Orang	2.234.150.000	Pengelolaan GTK PAUD	Jumlah GTK PAUD yang dikelola	31	Orang	2.234.150.000
			Jumlah GTK PAUD yang menerima insentif	612	Orang			Jumlah GTK PAUD yang menerima insentif	612	Orang	
1.01.20.60	Pengelolaan GTK DIKDAS	DIKBUD	Jumlah GTK DIKDAS yang dikelola	731	Orang	19.836.896.000	Pengelolaan GTK DIKDAS	Jumlah GTK DIKDAS yang dikelola	731	Orang	19.836.896.000
<b>01.01.31</b>	<b>Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal</b>	Lembaga PAUD	<b>Meningkatnya akses dan mutu layanan PAUD dan Pendidikan Nonformal di Kota Pangkalpinang</b>			<b>2.039.012.036</b>	<b>Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal</b>	<b>Meningkatnya akses dan mutu layanan PAUD dan Pendidikan Nonformal di Kota Pangkalpinang</b>			<b>2.039.012.036</b>
1.01.31.06	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal					245.829.636	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal				245.829.636
1.01.31.07	Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini					0	Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini				0
1.01.31.35	Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan PAUD		Terbinanya lembaga PAUD (lembaga)	97	lembaga	145.000.000	Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan PAUD	Terbinanya lembaga PAUD (lembaga)	97	lembaga	145.000.000
			Terakreditasinya lembaga PAUD (lembaga)	77	lembaga			Terakreditasinya lembaga PAUD (lembaga)	77	lembaga	
			Lembaga PAUD yang mendapatkan pembinaan	97	lembaga			Lembaga PAUD yang mendapatkan pembinaan	97	lembaga	
			Lembaga PAUD yang terakreditasi (lembaga)	77	lembaga			Lembaga PAUD yang terakreditasi (lembaga)	77	lembaga	
1.01.31.41	Peningkatan Mutu		Ruang kelas yang	1	Paket	595.000.000	Peningkatan Mutu	Ruang kelas yang	1	Paket	595.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
	Layanan Sarana PAUD dan PNF		direhabilitasi Meubelair pendidikan anak usia dini yang dipenuhi Meubelair PNF yang dipenuhi Ruang kelas yang terehabilitasi Meubelair PAUD yang terpenuhi Meubelair PNF yang dipenuhi	1 1 1 1 1	Paket Paket Paket Paket Paket		Layanan Sarana PAUD dan PNF	direhabilitasi Meubelair pendidikan anak usia dini yang dipenuhi Meubelair PNF yang dipenuhi Ruang kelas yang terehabilitasi Meubelair PAUD yang terpenuhi Meubelair PNF yang dipenuhi	1 1 1 1 1	Paket Paket Paket Paket Paket	
1.01.31.42	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman kurikulum Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan parenting jumlah jenis kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas anak usia dini	110 110 4	lembaga lembaga jenis	515.000.000	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman kurikulum Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan parenting jumlah jenis kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas anak usia dini	110 110 4	lembaga lembaga jenis	515.000.000
			Jumlah kelurahan yang mengikuti program BUNDA PAUD	42	kelurahan			Jumlah kelurahan yang mengikuti program BUNDA PAUD	42	kelurahan	
1.01.31.43	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SKB Pangkalpinang		Jumlah siswa SKB Pangkalpinang yang mendapat pelayanan KBM	304	siswa	538.182.400	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SKB Pangkalpinang	Jumlah siswa SKB Pangkalpinang yang mendapat pelayanan KBM	304	siswa	538.182.400
1.01.31.44	Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal		Sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal yang dibangun		jenis	-	Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal	Sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal yang dibangun		jenis	-
1.01.31.45	Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK FISIK)		Prasarana belajar PAUD yang direhabilitasi			-	Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK FISIK)	Prasarana belajar PAUD yang direhabilitasi			-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
<b>01.01.33</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PAUD</b>		<i>Terkelolanya penyaluran bantuan operasional pendidikan</i>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PAUD</b>	<i>Terkelolanya penyaluran bantuan operasional pendidikan</i>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>75.000.000,00</b>
1.01.33.05	Manajemen BOP PAUD	Managem en BOP PAUD	Persentase pengelolaan dana BOP selama 12 bulan (%)	12	bulan	75.000.000,00	Manajemen BOP PAUD	Persentase pengelolaan dana BOP selama 12 bulan (%)	12	bulan	75.000.000,00
<b>01.01.34</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)</b>	DIKDAS	<i>Tersedianya fasilitas umum yang memadai di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman</i>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)</b>	<i>Tersedianya fasilitas umum yang memadai di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman</i>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>80.000.000,00</b>
1.01.34.11	Manajemen BOS Dikdas	SKPD	Jumlah sekolah yang termonitoring dalam pengelolaan Dana BOS jenjang Dikdas	107	sekolah	80.000.000,00	Manajemen BOS Dikdas	Jumlah sekolah yang termonitoring dalam pengelolaan Dana BOS jenjang Dikdas	107	sekolah	80.000.000,00
<b>01.01.35</b>	<b>Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar</b>		<b>Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar di Kota Pangkalpinang</b>			<b>11.976.871.400,00</b>	<b>Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar</b>	<b>Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar di Kota Pangkalpinang</b>			<b>11.976.871.400,00</b>
1.01.35.01	Peningkatan Akses Pendidikan Dasar		jumlah ruang sekolah yang dibangun	22	sekolah	8.381.190.400,00	Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	jumlah ruang sekolah yang dibangun	22	sekolah	8.381.190.400,00
1.01.35.02	Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan Pendidikan Dasar					40.000.000,00	Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan Pendidikan Dasar				40.000.000,00
			Jumlah sekolah yang mengikuti pendampingan dan penguatan akreditasi SD	86	sekolah			Jumlah sekolah yang mengikuti pendampingan dan penguatan akreditasi SD	86	sekolah	
			Jumlah sekolah yang mengikuti pendampingan dan penguatan akreditasi	24	sekolah			Jumlah sekolah yang mengikuti pendampingan dan penguatan akreditasi	24	sekolah	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
			SMP					SMP			
1.01.35.03	Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar		Jumlah toilet/jamban yang direhabilitasi (SD)	3	sekolah	215.087.000,00	Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar	Jumlah toilet/jamban yang direhabilitasi (SD)	3	sekolah	215.087.000,00
1.01.35.04	Peningkatan Mutu Layanan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar					1.115.103.000,00	Peningkatan Mutu Layanan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar				1.115.103.000,00
			Jumlah peserta yang memahami Kurikulum SD	65	peserta			Jumlah peserta yang memahami Kurikulum SD	65	peserta	
			Jumlah peserta yang memahami Kurikulum SMP	65	peserta			Jumlah peserta yang memahami Kurikulum SMP	65	peserta	
			Jumlah peserta yang memahami penilaian SD	95	peserta			Jumlah peserta yang memahami penilaian SD	95	peserta	
			Jumlah peserta yang memahami penilaian SMP	95	peserta			Jumlah peserta yang memahami penilaian SMP	95	peserta	
			Jumlah sekolah yang menyusun dokumen kurikulum muatan lokal di sekolah (SD)	90	sekolah			Jumlah sekolah yang menyusun dokumen kurikulum muatan lokal di sekolah (SD)	90	sekolah	
			Jumlah sekolah yang menyusun dokumen kurikulum muatan lokal di sekolah (SMP)	30	sekolah			Jumlah sekolah yang menyusun dokumen kurikulum muatan lokal di sekolah (SMP)	30	sekolah	
			jumlah mata pelajaran (mapel) yang dibuatkan kisi-kisi USBN SD	5	mapel			jumlah mata pelajaran (mapel) yang dibuatkan kisi-kisi USBN SD	5	mapel	
			jumlah mata pelajaran (mapel) yang dibuatkan kisi-kisi USBN SMP	7	mapel			jumlah mata pelajaran (mapel) yang dibuatkan kisi-kisi USBN SMP	7	mapel	
1.01.35.05	Peningkatan Kualitas Peserta Didik Pendidikan Dasar					812.571.000,00	Peningkatan Kualitas Peserta Didik Pendidikan Dasar				812.571.000,00
			jumlah cabang perlombaan yang diikuti (SD dan SMP) ke tingkat lanjutan	43	cabang			jumlah cabang perlombaan yang diikuti (SD dan SMP) ke tingkat lanjutan	43	cabang	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
			jumlah siswa yang mengikuti pendidikan karakter	600	siswa			jumlah siswa yang mengikuti pendidikan karakter	600	siswa	
1.01.35.06	Pemberian Beasiswa Siswa SD		Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi jenjang SD	1500	siswa	675.880.000,00	Pemberian Beasiswa Siswa SD	Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi jenjang SD	1500	siswa	675.880.000,00
1.01.35.07	Pemberian Beasiswa Siswa SMP		Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi jenjang SMP	890	siswa	391.660.000,00	Pemberian Beasiswa Siswa SMP	Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi jenjang SMP	890	siswa	391.660.000,00
1.01.35.08	Penerimaan Peserta Didik Baru		Jumlah peserta didik yang diterimadi jenjang SD SMP	7901	siswa	51.380.000,00	Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah peserta didik yang diterimadi jenjang SD SMP	7901	siswa	51.380.000,00
1.01.35.09	Pembangunan Prasarana Belajar SD ( Dak Fisik )		Jumlah prasarana belajar yang dibangun	20	ruang	56.575.000,00	Pembangunan Prasarana Belajar SD ( Dak Fisik )	Jumlah prasarana belajar yang dibangun	20	ruang	56.575.000,00
1.01.35.10	Rehabilitasi Prasarana Belajar SD ( Dak Fisik )		Jumlah prasarana belajar yang direhab	24	ruang	59.153.000,00	Rehabilitasi Prasarana Belajar SD ( Dak Fisik )	Jumlah prasarana belajar yang direhab	24	ruang	59.153.000,00
1.01.35.11	Pengadaan Sarana Belajar SD ( Dak Fisik )		Jumlah sarana belajar yang dibeli	8	set	51.000.000,00	Pengadaan Sarana Belajar SD ( Dak Fisik )	Jumlah sarana belajar yang dibeli	8	set	51.000.000,00
1.01.35.12	Pembangunan Prasarana Belajar SMP( Dak Fisik )		Jumlah prasarana belajar yang dibangun	44	ruang	24.000.000,00	Pembangunan Prasarana Belajar SMP( Dak Fisik )	Jumlah prasarana belajar yang dibangun	44	ruang	24.000.000,00
1.01.35.13	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP ( Dak Fisik )		Jumlah prasarana belajar yang direhab	33	ruang	55.272.000,00	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP ( Dak Fisik )	Jumlah prasarana belajar yang direhab	33	ruang	55.272.000,00
1.01.35.14	Pengadaan Sarana Belajar SMP ( Dak Fisik )		Jumlah sarana belajar yang dibeli	4	set	48.000.000,00	Pengadaan Sarana Belajar SMP ( Dak Fisik )	Jumlah sarana belajar yang dibeli	4	set	48.000.000,00
						-					-
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>02.16</b>	<b>Kebudayaan</b>						<b>Kebudayaan</b>				

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
02.16.21	Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda		<i>Terlaksananya upaya pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya dan permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi</i>			2.417.891.800,00	Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda	<i>Terlaksananya upaya pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya dan permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi</i>			2.417.891.800,00
2.16.21.01	Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman		Cagar Budaya dan Permuseuman yang mendapat pemeliharaan Jumlah Komunitas Pencinta cagar Budaya yang dibentuk Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat	3 1 3	buah komunitas orang	137.518.200,00	Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman	Cagar Budaya dan Permuseuman yang mendapat pemeliharaan  Jumlah Komunitas Pencinta cagar Budaya yang dibentuk Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat	3 1 3	buah komunitas orang	137.518.200,00
2.16.21.02	Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah					1.880.373.600,00	Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah				1.880.373.600,00
			Jumlah Festival Budaya Daerah yang diselenggarakan Jumlah Gelar Seni Budaya yang diselenggarakan Jumlah Pentas Seni untuk menyambut tamu negara Terseleksinya group Lomba Seni suara tingkat nasional Jumlah peserta yang mengikuti pawai budaya dan getar seni APEKSI Jumlah kreasi seni daerah yang dihasilkan melalui seniman masuk	1 1 10 3 30 2	event event kali group peserta kreasi		Jumlah Festival Budaya Daerah yang diselenggarakan Jumlah Gelar Seni Budaya yang diselenggarakan Jumlah Pentas Seni untuk menyambut tamu negara Terseleksinya group Lomba Seni suara tingkat nasional Jumlah peserta yang mengikuti pawai budaya dan getar seni APEKSI Jumlah kreasi seni daerah yang dihasilkan melalui seniman masuk	1 1 10 3 30 2	event event kali group peserta kreasi		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
			sekolah (SMS)  Terbentuknya dewan kesenian kota pangkalpinang yang dibentuk dan aktif	1	lembaga			sekolah (SMS)  Terbentuknya dewan kesenian kota pangkalpinang yang dibentuk dan aktif	1	lembaga	
	Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi		Jumlah seleksi dan pelaksanaan pekan budaya nasional Jumlah karya tulis hasil lawatan sejarah Jumlah Anggota Saka Widya Budaya Bhakti yang mendapat pembinaan Jumlah penyelenggaraan pelestarian adat dan tradisi masyarakat pangkalpinang (Hari Jadi Pangkalpinang dan Provinsi)	1 60 23 2	event karya tulis anggota event	400.000.000,00	Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi	Jumlah seleksi dan pelaksanaan pekan budaya nasional Jumlah karya tulis hasil lawatan sejarah Jumlah Anggota Saka Widya Budaya Bhakti yang mendapat pembinaan Jumlah penyelenggaraan pelestarian adat dan tradisi masyarakat pangkalpinang (Hari Jadi Pangkalpinang dan Provinsi)	1 60 23 2	event karya tulis anggota event	400.000.000,00
			Jumlah Lembaga adat melayu yang terbentuk dan yang aktif	1	lembaga			Jumlah Lembaga adat melayu yang terbentuk dan yang aktif	1	lembaga	
<b>JUMLAH</b>						<b>44.014.923.883</b>					<b>44.014.923.883,00</b>

Hasil review menunjukkan bahwa rancangan RKPD telah sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021, dimana jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.44.014.923.883,-. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai program berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal
7. Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, usulan program dan kegiatan perangkat daerah memperhatikan kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan. Usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Pemangku Kepentingan, yang dalam hal ini satuan-satuan pendidikan (TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Pangkalpinang) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pengumpulan usulan dari para pemangku kepentingan tersebut merupakan hasil dari agenda Rakor Perencanaan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Aula SMA Negeri 3 dan Ruang Pertemuan Gedung Tudung Saji Kota Pangkalpinang pada bulan Februari Tahun 2020 yang lalu. Usulan dari para satuan pendidikan tersebut masuk ke dalam kategori dua program, yaitu Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar, dimana kedua program

tersebut sangat mendukung pemenuhan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terutama dalam hal penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Pendidikan, khususnya dalam hal sarana prasarana. Berikut uraian usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan yang terangkum dalam Tabel T.C 32

**Tabel T.C 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Kota Pangkalpinang**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal</b>				
	Peningkatan Mutu Layanan Sarana PAUD dan PNF	TKN 1	jumlah pagar sekolah yang direhabilitasi	1 unit	semua lokasi berada di Kota Pangkalpinang
		TKN 1, 2, 3, TK Pembina Kec. Rangkui dan TK Model	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	5 ruang kelas	
		TKN 2, 3, TK Pembina Kec. Rangkui dan TK Model	Jumlah jamban/WC yang direhabilitasi	4 unit WC	
		TK SKB	Jumlah ruang pertemuan yang direhabilitasi	1 ruang	
	Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	TKN 2	Jumlah pagar sekolah yang dibangun	1 unit	
		TKN 3, Model dan TK Pembina Kec. Tamansari	Jumlah taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir yang dibangun	3 unit	
		TK Pembina Kec. TamanSari	Jumlah jamban/WC yang dibangun	1 unit WC	
		Semua TKN (8 unit)	Jumlah Meubeuler yang dibeli	8 paket	
		Semua TKN (8 unit)	Jumlah Komputer yang dibeli	8 paket	
		Semua TKN (8 unit)	Jumlah Peralatan dan Media Pendidikan yang dibeli	8 paket	
		TKN Pembina Kec. Girimaya	Jumlah Sekolah baru yang dibangun	1 unit	
2.	<b>Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar</b>				
	Peningkatan Mutu Layanan sarana Pendidikan Dasar	SDN 6, 9, 18, 57, 33, 23, 28, 36, 43, 67, 47, 51 dan 56	jumlah pagar sekolah yang direhabilitasi	13 unit	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		SMPN 5, 7, 8 dan 10	jumlah pagar sekolah yang direhabilitasi	4 unit	
		SDN 3, 32, 37, 30, 12, 52, 1, 33, 36, 48, 50, 38, 11, 68, 47, 23, 49, 69, 63, 26, 13, 2, 66, 27, 46, 9, 17, 39 dan 62	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	29 ruang kelas	
		SMPN 5, 6, 8, 9 dan 10	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	5 ruang kelas	
		SDN 3, 37, 30, 33, 43, 1, 28, 52, 35, 38, 11, 68, 24, 4, 23, 49, 7, 56, 47, 55, 67, 69, 44, 26, 13, 66, 21, 62, 39, 8, 9, 46, 17 dan 6	Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi	34 ruang	
		SMPN 9	Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang	
		SDN 13, 54, 30, 3, 32, 52, 1, 33, 43, 36, 48, 38, 11, 68, 50, 64, 24, 56, 65, 41, 69, 44, 63, 42, 66, 62, 39, 18, 9, 27, 17 dan 6	Jumlah jamban/WC yang direhabilitasi	32 unit WC	
		SMPN 10	Jumlah jamban/WC yang direhabilitasi	1 unit WC	
		SMPN 4	Jumlah ruang laboratorium yang direhabilitasi	1 ruang	
		SDN 28, 36, 44, 39 dan 27	Jumlah ruang kesehatan (UKS) yang direhabilitasi	5 ruang	
		SMPN 7 dan 9	Jumlah ruang kesehatan (UKS) yang direhabilitasi	2 ruang	
		SDN 37, 48, 7, 56, 4, 9, 61, 36, 66, 46, 63, dan 17	Jumlah ruang guru yang direhabilitasi	12 ruang	
		SMPN 6, 8 dan 10	Jumlah ruang guru yang direhabilitasi	3 ruang	
		SD 4, 9, 63, 26, 40, 7, 38, 48, 33, 43, 28 dan 37	Jumlah ruang Kepala Sekolah yang direhabilitasi	12 ruang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		SMPN 6, 8 dan 10	Jumlah ruang Kepala Sekolah yang direhabilitasi	3 ruang	
		SDN 1, 3 dan 65	Jumlah ruang pertemuan yang direhabilitasi	3 ruang	
		SMPN 2, 3, 5, dan 6	Jumlah ruang pertemuan yang direhabilitasi	4 ruang	
		SMPN 6, 8 dan 7	Jumlah ruang administrasi TU yang direhabilitasi	3 ruang	
		SDN 5, 26, 28 dan 62	Jumlah Mushola yang direhabilitasi	4 unit	
		SMPN 8, 9 dan 10	Jumlah Mushola yang direhabilitasi	3 unit	
	Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	SDN 10, 14, 33, 19, 23, 20, 16, 24, 42, 21, 28, 39, 6, 46, 17, 35, 37 dan 15	Jumlah ruang kelas yang dibangun	18 unit	
		SMP 1, 2, 3 dan 7	Jumlah ruang kelas yang dibangun	18 unit	
		SDN 10, 29, 14, 43, 33, 52, 69, 50, 68, 20, 23, 12, 2, 60, 16, 44, 24, 67, 26, 9, 28, 54, 39, 8, 51, dan 65	Jumlah ruang guru yang dibangun	26 ruang	
		SMPN 1 dan 8	Jumlah ruang guru yang dibangun	2 ruang	
		SDN 32, 29, 14, 37, 52, 38, 11, 68, 22, 2, 23, 20, 64, 56, 12, 60, 47, 24, 44, 67, 40, 54, 28, 69, 17, 6, 63, 39, 65 dan 8	Jumlah ruang laboratorium yang dibangun	30 ruang	
		SMPN 1, 2, 4, 5, 6 dan 9	Jumlah ruang laboratorium yang dibangun	6 ruang	
		SDN 3, 32, 48, 16, 24, 44, 69, 17, 58, 25, 54, 13, 2, 27, 8 dan 50	Jumlah pagar yang dibangun	16 unit	
		SMPN 6	Jumlah pagar yang dibangun	1 unit	
		SDN 14, 52, 43, 38, 12, 22, 55, 47, 53, 4, 9, 54, 58, 45, 21, 36, 49, 66, 65 dan 8	Jumlah Ruang UKS yang dibangun	20 ruang	
		SMPN 1, 3, 5, 6, 8 dan 9	Jumlah Ruang UKS yang	6 ruang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			dibangun		
		SDN 14, 29, 3, 43, 35, 36, 38, 11, 68, 50, 7, 2, 55, 64, 56, 18, 16, 53, 40, 25, 9, 45, 54, 48, 21, 66, 46, 27, 65 dan 8	Jumlah Musholla yang dibangun	30 unit	
		SDN 14, 29, 10, 32, 3, 36, 68, 7, 64, 58, 60, 4, 67, 13, 5, 27, 63, 17, 8, 51, 65, 66, 39, 6, 61, 21, 54, 40, 26, 53, 44, 24, 18, 47, 2, 55, 15, 50, 69 dan 35	Jumlah taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir yang dibangun	40 unit	
		SMPN 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10	Jumlah taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir yang dibangun	8 unit	
		SDN 52, 14, 10, 32, 11, 68, 36, 64, 56, 48, 63, 17, 8, 51, 65, 39, 61, 54, 4, 40, 26, 24, 19, 2, 15 dan 43	Jumlah jamban/WC yang terbangun	26 unit	
		SMPN 3, 4, 5, 7, 9, dan 10	Jumlah jamban/WC yang terbangun	6 unit	
		Semua SDN Kota Pangkalpinang	Jumlah Meubeleur siswa yang dibeli	66 paket	
		Semua SMPN Kota Pangkalpinang	Jumlah Meubeleur siswa yang dibeli	10 paket	
		Semua SDN Kota Pangkalpinang	Jumlah Komputer yang dibeli	66 paket	
		Semua SMPN Kota Pangkalpinang	Jumlah Komputer yang dibeli	10 paket	
		Semua SDN Kota Pangkalpinang	Jumlah peralatan dan media pendidikan yang dibeli	66 paket	
		Semua SMPN Kota Pangkalpinang	Jumlah peralatan dan media pendidikan yang dibeli	10 paket	
		SDN 14, 29, 38, 23, 20, 56, 60, 32, 28, 39, 54, 2, 24, 40 dan 33	Jumlah Ruang Kepala sekolah yang dibangun	15 ruang	
		SDN 3	Jumlah ruang pertemuan yang dibangun	1 unit	
		SMPN 2	Jumlah ruang pertemuan yang dibangun	1 unit	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		SMPN 6	Jumlah Gedung Kesenian yang dibangun	1 unit	

# **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

---

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Cerdasnya kehidupan bangsa merupakan janji negara kepada seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Dengan demikian, pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama di tiap periode pemerintahan.

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025. Penelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, yang memuat 4 (empat) periode RPJMN. Pada periode RPJMN yang pertama (2005-2009), pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Lalu pada periode kedua (2009-2014), pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian pada periode ketiga (2015-2019), pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional. Dan pada periode keempat (2020-2024), pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing internasional.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyusunan dokumen Renja OPD merupakan satu kesatuan dengan penyusunan dokumen RKPD Pemerintah Daerah untuk tahun berkenaan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan

RKPD mengacu pada RPJMD dan RPJMN. RPJMD yang menjadi patokan adalah RPJMD 2019-2023, dan RPJMN yang menjadi patokan adalah RPJMN 2020-2024. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, untuk periode tahun 2020-2024 sistem pendidikan yang dibentuk adalah pendidikan yang mencetak anak bangsa menjadi insan yang berdaya saing di taraf internasional.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran RenjaDinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Renja Dinas Pendidikan dan kebudayaan disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2023, dimana Misi terkait bidang Pendidikan dan Kebudayaan tertuang pada Misi ke 4 yaitu : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber daya Manusia yang berkeadilan dan program prioritas Kepala Daerah nomor 7 yaitu Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender. Berdasarkan dua hal tersebut, maka tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum di dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan PAUD, PNF dan DIKDAS yang berkualitas, merata dan terjangkau.
2. Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda.
3. Mewujudkan Tata Kelola OPD yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkanlah sasaran-sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Tersedia dan terjangkaunya akses pendidikan bagi anak usia dini, PNF dan pendidikan dasar Indikator dari sasaran ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar.
2. Tersedia dan terjangkaunya akses pendidikan bagi remaja dan orang dewasa putus sekolah, dengan indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan

3. Tersedianya layanan pendidikan yang bermutu dan berwawasan lingkungan, dengan indikator sebagai berikut:
  - Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik
  - Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik
  - Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik
  - Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A
  - Persentase satuan DIKDAS yang terakreditasi A
  - Persentase sekolah hijau (adiwiyata) minimal tingkat propinsi
4. Meningkatnya efektifitas dan relevansi layanan pendidikan, dengan indikator sebagai berikut :
  - Angka Putus Sekolah Dasar (SD)
  - Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  - Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD)
  - Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  - Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Dasar (SD)
  - Angka Melanjutkan Siswa Menengah Pertama (SMP)
  - Persentase Capaian SPM Pendidikan
5. Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu, dengan indikator sebagai berikut :
  - Persentase guru PAUD, PNF yang berkualifikasi S1/DIV
  - Persentase guru PAUD, PNF yang bersertifikat pendidik
  - Persentase guru DIKDAS yang berkualifikasi S1/DIV
  - Persentase guru DIKDAS yang bersertifikat pendidik
  - Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru PAUD Nilai di atas 70
  - Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru DIKDAS nilai di Tas 70
6. Terlestarinya budaya benda (cagar budaya dan permuseuman), dengan indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan.

7. Pemajuan budaya tak benda (seni, sejarah dan tradisi), dengan indikator persentase seni budaya yang dilestarikan dan persentase sejarah dan tradisi yang dilestarikan.
8. Tersedianya Sistem Tatakelola dan SDM yang handal dalam menjalin terselenggaranya layanan prima, dengan indikator Predikat (Nilai) SAKIP perangkat daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
9. Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan, dengan indikator Persentase pengelolaan dan pelaporan dana BOS/BOP.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **a. Dasar pertimbangan penentuan program dan kegiatan**

Dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021, penentuan program dan kegiatan yang prioritas maupun non prioritas didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tertentu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program dan kegiatan yang dipilih dianggap dapat mengakomodir dan menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama yang berkaitan dengan program prioritas kepala daerah terpilih. Adapun beberapa pertimbangan tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut :

### 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu visi kepala daerah terpilih adalah meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan. Peningkatan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Berdasar hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berupaya memformulasikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kondisi tersebut. Salah satunya

### 2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pendidikan merupakan salah satu target pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam program SDGs hingga tahun 2030. Pada tujuan ke empat disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya Pembangunan Berkualitas, dengan memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Diharapkan, program dan kegiatan yang direncanakan berdampak positif bagi pencapaian tujuan SDGs 2030.

### 3. Pengentasan Kemiskinan

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja maupun dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah. Oleh karena itulah, peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) secara tidak langsung menjadi strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang layak berpengaruh besar dalam penentuan kualitas pendidikan masyarakat. Semakin baik kualitas pendidikan masyarakat, maka semakin besar pula peluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak pada saat usia aktif bekerja nanti.

#### 4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan)

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebelumnya diatur dalam amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota. Amanat SPM menurut peraturan tersebut lebih menitikberatkan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di daerah, berikut juga tentang dukungan ketersediaan tenaga pendidik yang berkompeten. Peraturan menteri tersebut kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya,

#### **b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang pendidikan dan kebudayaan Tahun 2021 dijabarkan dalam tabel rencana program dan kegiatan berikut ini :

Tabel TC. 33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 dan  
Prakiraan Maju Tahun 2022  
Kota Pangkalpinang**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>									
<b>01.01</b>	<b>Pendidikan</b>					<b>37.811.523.883,00</b>				
<b>1.01.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<i>Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi OPD</i>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.114.797.094,00</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.131.298.819,20</b>
1.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	12	Bulan	397.850.000,00	APBD	12	Bulan	421.197.102,00
1.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	12	Bulan	925.175.000,00	APBD	12	Bulan	1.017.692.500,00
1.01.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	SKPD	10	Unit	179.612.150,00		10	Unit	179.612.150,00
1.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	12	Bulan	78.002.706,00	APBD	12	Bulan	85.802.976,60
1.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapatkan perbaikan	SKPD	3	Jenis	15.000.000,00	APBD	3	Jenis	16.500.000,00
1.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu penyediaan ATK di OPD	SKPD	12	Bulan	43.499.200,00	APBD	12	Bulan	47.849.120,00
1.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	12	Bulan	34.077.246,00	APBD	12	Bulan	37.484.970,60
1.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	12	Bulan	10.000.000,00	APBD	12	Bulan	11.000.000,00
1.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah yang dibeli	SKPD	3	Jenis	33.662.900,00	APBD	3	Jenis	
1.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	12	Bulan	5.600.000,00	APBD	12	Bulan	6.160.000,00
1.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai	SKPD	12	Bulan	30.000.000,00	APBD	12	Bulan	33.000.000,00
1.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Luar Daerah	12	Bulan	250.000.000,00	APBD	12	Bulan	275.000.000,00
1,01,01,30	Penataan arsip perkantoran	Jumlah waktu penataan arsip perkantoran		12	Bulan	46.007.892,00		12	Bulan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1,01,01,31	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah					66.310.000,00				
<b>01.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>840.360.350,00</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>337.326.385,00</b>
1.01.02.00	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan		5	Unit	10.000.000,00		5	Unit	10.000.000,00
1.01.02.07	Penyediaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli		1	Unit	27.500.000,00		1	Unit	27.500.000,00
1.01.02.09	Penyediaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	SKPD	2	Unit	25.696.350,00	APBD	2	Unit	28.265.985,00
1.01.02.22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor	SKPD	12	Bulan	144.554.000,00	APBD	12	Bulan	159.009.400,00
1.01.02.24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	12	Bulan	136.410.000,00		12	Bulan	150.051.000,00
1.01.02.40	Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK (teknologi informasi dan komunikasi)	Jumlah sarana prasarana TIK dalam mendukung pelayanan (sarana)		2	Sarana	296.200.000,00		2	Sarana	
		Jumlah waktu pengelolaan jaringan dan website OPD		4	Bulan			4	Bulan	
		Jumlah waktu penyewaan VPS (virtual private server)		12	Bulan			12	Bulan	
		Jumlah waktu penyewaan domain web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah		12	Bulan			12	Bulan	
		Jumlah waktu pemeliharaan server dan jaringan internet/internet Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		12	Bulan			12	Bulan	
1.01.02.141	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun		1	Unit	200.000.000,00				
<b>01.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>525.343.400,00</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>525.343.400,00</b>
1,01,05,85	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		110	stel	71.145.000,00		110	Stel	71.145.000,00
1,01,05,93	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah berkas perhitungan penetapan angka kredit yang dinilai		115	Berkas	89.047.400,00		115	Berkas	89.047.400,00
1.01.05.94	Pendidikan dan Pelatihan calon pengawas sekolah	Jumlah calon pengawas sekolah yang mengikuti diklat		30	orang	365.151.000,00		30	orang	365.151.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>01.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terlaksananya upaya peningkatan dan pengembangan atas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>10</b>	<b>Laporan</b>	<b>550.233.600,00</b>				<b>605.256.960,00</b>
1,01,06,02	Penyusunan laporan semesteran keuangan	Jumlah dokumen laporan semesteran keuangan yang disusun	SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	APBD	1	Dokumen	5.500.000,00
1,01,06,04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	SKPD	1	Dokumen	6.000.000,00	APBD	1	Dokumen	6.600.000,00
1,01,06,32	Pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah jenis buku profil pendidikan dan kebudayaan yang disusun	SKPD	1	Jenis	201.136.600,00	APBD	4	Buku	221.250.260,00
		Jumlah jenis buku profil pendidik dan tenaga kependidikan yang disusun		1	Jenis					
		Jumlah jenis buku rangkuman pendidikan yang disusun		1	Jenis					
		Jumlah satuan pendidikan yang melakukan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan		209	Satuan Pendidikan					
		Tersedianya buku saku Pendidikan dan Kebudayaan		1	Jenis					
1,01,06,33	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang disusun	SKPD	3	Jenis	100.000.000,00	APBD	3	Jenis	110.000.000,00
1,01,06,34	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah jenis dokumen evaluasi perencanaan yang disusun	SKPD	1	Jenis	100.000.000,00	APBD	1	Jenis	110.000.000,00
1,01,06,35	Bimtek Penatausahaan Keuangan sekolah	jumlah sekolah yang mengikuti bimtek	SKPD	36	sekolah	138.097.000,00	APBD	36	sekolah	151.906.700,00
<b>1,01,20</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>				<b>23.393.408.203.00</b>				<b>21.202.014.203</b>
1.01.20.55	Pengembangan mutu PTK dalam pemanfaatan TIK	Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis TIK		40	Orang	149.999.800		40	Orang	159.999.800
		Jumlah guru SMP yang mengikuti pembelajaran berbasis TIK		40	Orang			40	Orang	
		Guru SD yang terlatih memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas		40	Orang			40	Orang	
		Guru SMP yang terlatih memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas		40	Orang			40	Orang	
1.01.20.56	Pengembangan mutu PTK PAUD,PNF dan Tenaga Kebudayaan					485.822.503				485.822.503

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan		110	Orang				
		jumlah Guru PAUD dan PNF yang dapat mengikuti lomba pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan ke tingkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)		16	Orang				
		Jumlah Guru PAUD Formal berprestasi ke tingkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)		3	Orang				
1.01.20.58	Pengembangan Mutu PTK DIKDAS					688.545.900			688.545.900
		Jumlah Calon Kepala Sekolah SD/SMP yang mengikuti diklat		30	Orang				
		Jumlah PTK SD berprestasi yang mengikuti lomba tingkat lanjutan (minimal tingkat provinsi)		3	Orang				
		Jumlah PTK SMP berprestasi yang mengikuti lomba tingkat lanjutan (minimal tingkat provinsi)		3	Orang				
1.01.20.59	Pengelolaan GTK PAUD					2.234.150.000			2.234.150.000
		Jumlah GTK PAUD yang dikelola		31	Orang				
		Jumlah GTK PAUD yang menerima insentif		612	Orang				
1.01.20.60	Pengelolaan GTK DIKDAS	Jumlah GTK DIKDAS yang dikelola		731	Orang	19.836.896.000			17.633.496.000
<b>01.01.31</b>	<b>Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal</b>	<b>Meningkatnya akses dan mutu layanan PAUD dan Pendidikan Nonformal di Kota Pangkalpinang</b>	Lembaga PAUD			<b>2.039.012.036</b>	APBD	Jenis	<b>2.242.913.239,60</b>
1.01.31.06	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga yang termonitoring dalam Penggunaan BOP Kesetaraan		8	lembaga	245.829.636	APBD	Jenis	270.412.599,60
1.01.31.35	Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan PAUD								592.000.640
		Lembaga PAUD yang mendapatkan pembinaan		97	lembaga	145.000.000		97	lembaga
		Lembaga PAUD yang terakreditasi (lembaga)		77	lembaga			77	lembaga
1.01.31.41	Peningkatan Mutu Layanan Sarana PAUD dan PNF								
		Ruang kelas yang direhabilitasi		1	Paket			1	Paket
		Meubelair pendidikan anak usia dini yang dipenuhi		1	Paket			1	Paket
		Meubelair PNF yang dipenuhi		1	Paket	595.000.000		1	Paket
		Ruang kelas yang terehabilitasi		1	Paket			1	Paket
		Meubelair PAUD yang terpenuhi		1	Paket			1	Paket

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				1	Paket			1	Paket	
1.01.31.42	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Meubelair PNF yang dipenuhi		1	Paket	515.000.000		1	Paket	
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman kurikulum		110	lembaga					
		Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan parenting		110	lembaga					
		jumlah jenis kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas anak usia dini		4	jenis					
		Jumlah kelurahan yang mengikuti program BUNDA PAUD		42	kelurahan					
1.01.31.43	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SKB Pangkalpinang	Jumlah siswa SKB Pangkalpinang yang mendapat pelayanan KBM		304	siswa	538.182.400	APBD			592.000.640,00
1.01.31.44	Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal	Sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal yang dibangun			jenis	-	APBD			-
1.01.31.45	Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK FISIK)	Prasarana belajar PAUD yang direhabilitasi				-	APBD			-
<b>01.01.33</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PAUD</b>	<b><i>Terkelolanya penyaluran bantuan operasional pendidikan</i></b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>75.000.000,00</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>82.500.000,00</b>
1.01.33.05	Manajemen BOP PAUD	Persentase pengelolaan dana BOP selama 12 bulan (%)	Manajemen BOP PAUD	12	bulan	75.000.000,00	APBD	12	bulan	82.500.000,00
<b>01.01.34</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)</b>	<b><i>Tersedianya fasilitas umum yang memadai di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman</i></b>	DIKDAS	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>80.000.000,00</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>88.000.000,00</b>
1.01.34.11	Manajemen BOS Dikdas	Jumlah sekolah yang termonitoring dalam pengelolaan Dana BOS jenjang Dikdas	SKPD	107	sekolah	80.000.000,00	APBD	107	sekolah	88.000.000,00
<b>01.01.35</b>	<b>Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar</b>	<b>Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar di Kota Pangkalpinang</b>				<b>11.976.871.400,00</b>				<b>12.253.487.000,00</b>
1.01.35.01	Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	jumlah ruang sekolah yang dibangun		22	sekolah	8.381.190.400,00		22	sekolah	8.485.726.000,00
1.01.35.02	Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan Pendidikan Dasar					40.000.000,00				40.000.000,00
		Jumlah sekolah yang mengikuti pendampingan dan penguatan akreditasi SD		86	sekolah					

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah sekolah yang mengikuti pendampingan dan penguatan akreditasi SMP		24	sekolah			
1.01.35.03	Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar	Jumlah toilet/jamban yang direhabilitasi (SD)		3	sekolah	215.087.000,00		215.087.000,00
1.01.35.04	Peningkatan Mutu Layanan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar					1.115.103.000,00		1.115.103.000,00
		Jumlah peserta yang memahami Kurikulum SD		65	peserta			
		Jumlah peserta yang memahami Kurikulum SMP		65	peserta			
		Jumlah peserta yang memahami penilaian SD		95	peserta			
		Jumlah peserta yang memahami penilaian SMP		95	peserta			
		Jumlah sekolah yang menyusun dokumen kurikulum muatan lokal di sekolah (SD)		90	sekolah			
		Jumlah sekolah yang menyusun dokumen kurikulum muatan lokal di sekolah (SMP)		30	sekolah			
		jumlah mata pelajaran (mapel) yang dibuatkan kisi-kisi USBN SD		5	mapel			
		jumlah mata pelajaran (mapel) yang dibuatkan kisi-kisi USBN SMP		7	mapel			
1.01.35.05	Peningkatan Kualitas Peserta Didik Pendidikan Dasar					812.571.000,00		812.571.000,00
		jumlah cabang perlombaan yang diikuti (SD dan SMP) ke tingkat lanjutan		43	cabang			
		jumlah siswa yang mengikuti pendidikan karakter		600	siswa			
1.01.35.06	Pemberian Beasiswa Siswa SD	Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi jenjang SD		1500	siswa	675.880.000,00		700.000.000,00
1.01.35.07	Pemberian Beasiswa Siswa SMP	Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi jenjang SMP		890	siswa	391.660.000,00		400.000.000,00
1.01.35.08	Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah peserta didik yang diterimadi jenjang SD SMP		7901	siswa	51.380.000,00		75.000.000,00
1.01.35.09	Pembangunan Prasarana Belajar SD ( Dak Fisik )	Jumlah prasarana belajar yang dibangun		20	ruang	56.575.000,00		75.000.000,00
1.01.35.10	Rehabilitasi Prasarana Belajar SD ( Dak Fisik )	Jumlah prasarana belajar yang direhab		24	ruang	59.153.000,00		75.000.000,00
1.01.35.11	Pengadaan Sarana Belajar SD ( Dak Fisik )	Jumlah sarana belajar yang dibeli		8	set	51.000.000,00		75.000.000,00
1.01.35.12	Pembangunan Prasarana Belajar	Jumlah prasarana belajar yang dibangun		44	ruang	24.000.000,00		35.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	SMP( Dak Fisik )								
1.01.35.13	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP ( Dak Fisik )	Jumlah prasarana belajar yang direhab		33 ruang	55.272.000,00				75.000.000,00
1.01.35.14	Pengadaan Sarana Belajar SMP ( Dak Fisik )	Jumlah sarana belajar yang dibeli		4 set	48.000.000,00				75.000.000,00
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>02.16</b>	<b>Kebudayaan</b>								
<b>02.16.21</b>	<b>Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda</b>	<i>Terlaksananya upaya pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya dan permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi</i>			<b>2.417.891.800,00</b>				<b>2.659.680.980,00</b>
2.16.21.01	Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman	Cagar Budaya dan Permuseuman yang mendapat pemeliharaan		3 buah	137.518.200,00	APBD	3 buah	151.270.020,00	
		Jumlah Komunitas Pencinta cagar Budaya yang dibentuk		1 komunitas			1 komunitas		
		Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat		3 orang			3 orang		
2.16.21.02	Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah				1.880.373.600,00	APBD			2.068.410.960,00
		Jumlah Festival Budaya Daerah yang diselenggarakan		1 event			1 event		
		Jumlah Gelar Seni Budaya yang diselenggarakan		1 event			1 event		
		Jumlah Pentas Seni untuk menyambut tamu negara		10 kali			10 kali		
		Terseleksinya group Lomba Seni suara tingkat nasional		3 group			3 group		
		Jumlah peserta yang mengikuti pawai budaya dan getar seni APEKSI		30 peserta			30 peserta		
		Jumlah kreasi seni daerah yang dihasilkan melalui seniman masuk sekolah (SMS)		2 kreasi			2 kreasi		
		Terbentuknya dewan kesenian kota pangkalpinang yang dibentuk dan aktif		1 lembaga			1 lembaga		
	Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi				400.000.000,00	APBD			440.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah seleksi dan pelaksanaan pekan budaya nasional		1	event			1	event	
		Jumlah karya tulis hasil lawatan sejarah		60	karya tulis			60	karya tulis	
		Jumlah Anggota Saka Widya Budaya Bhakti yang mendapat pembinaan		23	anggota			23	anggota	
		Jumlah penyelenggaraan pelestarian adat dan tradisi masyarakat pangkalpinang (Hari Jadi Pangkalpinang dan Provinsi)		2	event			2	event	
		Jumlah Lembaga adat melayu yang terbentuk dan yang aktif		1	lembaga			1	lembaga	
<b>JUMLAH</b>										<b>42.127.820.986,80</b>

# **BAB IV**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

---

Rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 diusulkan untuk dibiayai melalui 3 (tiga) sumber dana yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia, mengingat terbatasnya kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengakomodir seluruh rencana pembangunan yang diusulkan Perangkat Daerah.

Berikut rincian rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 beserta rencana pendanaannya :

### **Rencana program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kota Pangkalpinang :**

#### **1. Program Wajib Pelayanan Dasar**

##### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 2.114.797.094,-**

Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan peralatan rumah tangga;
10. Penyediaan bahan bacaan/buku peraturan perundang-undangan;
11. Penyediaan makanan dan minuman;

12. Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah;
  13. Penataan arsip perkantoran.
  14. Pengelolaan dan penatausahaan Aser Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 840.360.350,-**
- Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan
15. Penyediaan perlengkapan gedung kantor;
  16. Penyediaan peralatan gedung kantor;
  17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  18. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional;
  19. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor;
  20. Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK(Teknologi Informasi dan Komunikasi);
  21. Pembangunan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 525.343.400,-**
- Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
22. Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah.
  23. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
  24. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 550.233.600,-**
- Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
25. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
  26. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
  27. Pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan;
  28. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
  29. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
  30. Bimtek penatausahaan keuangan sekolah.

**e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 23.393.408.203,- :**

Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

31. Pengembangan Mutu PTK DIKDAS;
32. Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan;
33. Pengembangan Mutu PTK dalam Pemanfaatan TIK;
34. Pengelolaan GTK PAUD;
35. Pengelolaan GTK Dikdas;

**f. Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Nonformal, dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 2.039.012.036,-**

Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

36. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Nonformal;
37. Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan PAUD
38. Peningkatan Mutu Layanan Sarana PAUD dan PNF;
39. Pengembangan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
40. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SKB Pangkalpinang;

**g. Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP), dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 75.000.000,-**

Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan;

41. Manajemen BOP PAUD;

**h. Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS), dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 80.000.000,-**

Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

42. Manajemen BOS DIKDAS

**i. Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar, dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 11.773.103.000,-**

Dengan beberapa kegiatan :

43. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar;
44. Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan Pendidikan Dasar;

45. Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar
46. Peningkatan Mutu Layanan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
47. Peningkatan Kualitas Pesertra Didik Pendidikan Dasar
48. Pemberian Beasiswa Siswa SD
49. Pemberian Beasiswa Siswa SMP
50. Penerimaan Peserta Didik Baru
51. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP( DAK FISIK)

## **2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

### **a. Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda, dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 2.621.660.200,-**

1. Pengembangan, Pelestarian Dan Perlindungan Cagar Budaya Dan Permuseuman
2. Pengembangan, Pelestarian Dan Perlindungan Seni Dan Budaya Daerah
3. Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi

## **Rencana program dan kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

### **a. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan :**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualifikasi guru PAUD ke S1 (lanjutan).

## **Rencana program dan kegiatan yang dibiayai APBN Kota Pangkalpinang**

### **b. Program penyediaan akses dan mutu layanan PAUD dan Pendidikan Nonformal**

Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengadaan Sarana Belajar SKB;
2. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan Anak Usia Dini;
3. Pembangunan prasarana belajar SKB;
4. Rehabilitasi prasarana belajar SKB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

#### **5.1. Catatan-catatan Penting**

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk tahun 2021, sekaligus sebagai gambaran pelaksanaan RKPD Kota Pangkalpinang untuk urusan pendidikan dan kebudayaan. Beberapa tugas penting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat terkait dengan isu-isu strategis nasional seperti :

1. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah di Bidang Pendidikan
2. Pencapaian SPM Pendidikan
3. Pencapaian Salah Satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
4. Pencapaian Salah Satu Upaya Tidak Langsung dalam Pengentasan Kemiskinan

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan ini diupayakan mengakomodir isu-isu strategis di atas dan dimaksimalkan untuk pencapaian indikator yang menjadi kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak maksimalnya pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tentunya berpengaruh pula pada kebijakan – kebijakan Pemerintah Pusat yang akan diambil untuk Pendidikan di Kota Pangkalpinang. Adapun indikator kinerja utama yang berupaya dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dijabarkan melalui tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
1.	Tersedianya dan terjangkau akses pendidikan bagi anak usia dini, PNF dan Pendidikan Dasar	1.1	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (0-6 Tahun)	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
2	Tersedia dan Terjangkau akses pendidikan bagi remaja dan orang dewasa putus sekolah	2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
3	Tersedianya layanan pendidikan yang bermutu dan berwawasan lingkungan	3.1	Prosentase kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		3.2	Prosentase kualitas sarana dan prasarana Sekolah Dasar (SD)	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		3.4	Prosentase kualitas sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		3.5	Prosentase satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang terakreditasi A	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		3.6	Prosentase Satuan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang terakreditasi A	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		3.7	Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata) minimal tingkat propinsi	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
4	Meningkatnya efektifitas dan relevansi layanan pendidikan	4.1	Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		4.2	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan	
		4.3	Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD)	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		4.4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		4.5	Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Dasar (SD)	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		4.6	Angka Melanjutkan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		4.7	Rata-rata Capaian SPM Pendidikan	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
5	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	5.1	Prosentase guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) yang berkualifikasi S1/DIV	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		5.2	Prosentase guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) yang bersertifikat pendidik	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		5.3	Prosentase Guru Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang berkualifikasi S1/DIV	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		5.4	Prosentase Guru Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bersertifikat pendidik	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		5.5	Prosentase Hasil Uji Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nilai diatas 70	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		5.6	Prosentase Hasil Uji Kompetensi Guru Pendidikan Dasar (DIKDAS) Nilai diatas 70	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
6	Terlestariannya budaya benda (cagar budaya)	6.1	Jumlah cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
7	Berkembangnya budaya tak benda (seni, sejarah dan tradisi)	7.1	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		7.2	Jumlah sejarah dan tradisi yang dilestarikan	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
8	Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima	8.1	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
		8.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
9	Tersedianya SDM yang handal dalam menjamin layanan prima dan efisien	9.1	Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
10	Tersedianya data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan		Prosentase lembaga pendidikan yang memiliki dan memanfaatkan TIK	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
			Prosentase lembaga yang melaksanakan pendataan pendidikan	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	
11	Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan		Prosentase pengelolaan dan pelaporan dana BOS/BOP	DIKBUD PKP 2019	Data DIKBUD PKP 2019	

## **5.2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagaiberikut :

1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2021 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun Kota Pangkalpinang 2021.
2. Renja Tahun 2020 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
3. Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengusulkan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Pelaksanaan program dan kegiatan harus selaras dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021. Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Renja ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam mensukseskan program – program strategis Walikota Pangkalpinang yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengusulkan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

**Pangkalpinang,                      Juni 2020**  
**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA PANGKALPINANG,**



**EDDY SUPRIADI, M.Pd**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 196701272005011002**

# LAMPIRAN

**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG**

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	WAJIB	PENDIDIKAN									PENDIDIKAN	WAJIB PELAYANAN DASAR	1	1				
	PILIHAN	KEBUDAYAAN									KEBUDAYAAN	WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2				
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani			1	1	0	1		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik								

									Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum							1	1	0	2.0	3		
					Penataan Arsip Perkantoran	Jumlah waktu penataan arsip perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penataan surat menyurat /arsip perkantoran										1	1	0	2.0	3	1
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										1	1	0	2.0	3	0
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor										1	1	0	2.0	3	0
							Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah ASN yang mendapatkan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan										1	1	0	2.0	3	0
							Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan										1	1	0	2.0	3	0
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah waktu layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional										1	1	0	2.0	3	0

					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	-					1	1	01	2.03	07
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	-					1	1	01	2.03	08
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	-					1	1	01	2.03	09
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan ATK di OPD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan ATK di OPD	-					1	1	01	2.03	10
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					1	1	01	2.03	11
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-					1	1	01	2.03	12
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	-					1	1	01	2.03	
					Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	jumlah sarana prasarana TIK dalam mendukung pelayanan (sarana)		jumlah sarana prasarana TIK dalam mendukung pelayanan (sarana)										
					TIK(Teknologi Informasi dan Komunikasi)	jumlah waktu pengelolaan jaringan & website OPD		jumlah waktu pengelolaan jaringan & website OPD										

						Jumlah waktu penyewaan Virtual Private Server		Jumlah waktu penyewaan Virtual Private Server																
						Jumlah waktu penyewaan domain Web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah		Jumlah waktu penyewaan domain Web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah																
						Jumlah waktu pemeliharaan Server dan jaringan internet Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah waktu pemeliharaan Server dan jaringan internet Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah yang dibeli	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah yang dibeli											1	1	0 1	2.0 3	1 4
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan											1	1	0 1	2.0 3	1 5
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia											1	1	0 1	2.0 3	1 6
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai											1	1	0 1	2.0 3	1 7

						Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti							-			1	1	01	2.03	18	
								Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang disediakan										1	1	01	2.03	19	
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dibeli	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dibeli								-			1	1	01	2.03	20
								Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan										1	1	01	2.03	21	
								Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia										1	1	01	2.03	22	
								Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan										1	1	01	2.03	23	
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli								-			1	1	01	2.03	24
								Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang tersedia										1	1	01	2.03	25	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah unit rumah jabatan yang terpelihara										1	1	01	2.03	26	

							Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah unit rumah dinas yang terpelihara									1	1	0	2.0	2	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor										1	1	0	2.0	2
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang terpelihara										1	1	0	2.0	2
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional										1	1	0	2.0	3
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/diknas yang terpelihara										1	1	0	2.0	3
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan										1	1	0	2.0	3
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara										1	1	0	2.0	3
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan										1	1	1	2.0	3
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah meubelair yang terpelihara										1	1	0	2.0	3

								Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara								1	1	01	203	36
								Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara								1	1	01	203	37
								Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung dan instalasi gedung yang direhab sedang/berat								1	1	01	203	38
								Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara								1	1	01	203	39
								Rehabilitasi Sedang /Berat kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang mendapat rehabilitasi sedang/berat								1	1	01	203	40
<b>KEGIATAN PINDAH KE DINAS PU PUPR</b>																					
										Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	1	03	08	201



						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD											1	0	0	2.0	0		
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	jumlah dokumen laporan semesteran keuangan yang disusun	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	jumlah dokumen laporan semesteran keuangan yang disusun												1	0	0	2.0	0	
								Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun												1	0	0	2.0	0	
						Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun												1	0	0	2.0	0	
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu										1	0	0	2.0		
						Penyusunan RENJA (RKT,RKA ,DPA)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran jangka pendek	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran jangka menengah dan pendek													1	0	0	2.0	0
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat daerah dalam perencanaan daerah	Tersusunnya Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah													1	0	0	2.0	0
							Tersusunnya Dokumen Pemakaian Baju Adat Melayu dan cagar budaya			Tersusunnya Dokumen Pemakaian Baju Adat Melayu dan cagar budaya														1	0	0

						Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Perencanaan Pendidikan		Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Perencanaan Pendidikan													
						Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Perencanaan Kebudayaan		Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Perencanaan Kebudayaan													
						jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan renja	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan renja													
						jumlah dokumen capaian penerapan SPM yang tersusun		jumlah dokumen capaian penerapan SPM yang tersusun													
						Jumlah Peserta yang mengikuti Evaluasi Hasil Capaian SNP		Jumlah Peserta yang mengikuti Evaluasi Hasil Capaian SNP													
						Jumlah Peserta yang mengikuti Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Peserta yang mengikuti Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan								1	0	0	2.0	0	
						Jumlah dokumen laporan AKIP yang tersusun		Jumlah dokumen laporan AKIP yang tersusun								1	1	1	1	3	
						terlaksananya PMPRB OPD		terlaksananya PMPRB OPD													
						jumlah dokumen SPIP yang tersusun		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen SPIP yang tersusun							1	0	0	2.0	4	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1	0	0	2.0	0		
															1	1	1	1	5		



					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal								1	0	0	2.0	0		
					Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah	Jumlah calon pengawas sekolah yang mengikuti diklat	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah calon pengawas sekolah yang mengikuti diklat										1	0	0	2.0	0
							Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi									1	1	0	2.0	1	
					Bimbingan Teknis/Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan									1	0	0	2.0	1	
					Bimtek Penatausahaan Keuangan Sekolah	jumlah sekolah yang mengikuti bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah sekolah yang mengikuti bimtek keuangan sekolah														
					<b>PELAYANAN DASAR</b>																	
					<b>PENDIDIKAN</b>																	
					<b>PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DASAR</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</b>		<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</b>														
						<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SD</b>		<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SD</b>														
						<b>Angka Partisipasi Murni (APM) SD</b>		<b>Angka Partisipasi Murni (APM) SD</b>														
						<b>Jumlah SD/MI yang terakreditasi A</b>		<b>Jumlah SD/MI yang terakreditasi A</b>														
						<b>Rata-rata nilai USBN SD</b>		<b>Rata-rata nilai USBN SD</b>														
							<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										1	0	0			
								<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</b>														
								<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SD</b>														
								<b>Angka Partisipasi Murni (APM) SD</b>														
								<b>Jumlah SD/MI yang terakreditasi A</b>														
								<b>Rata-rata nilai USBN SD</b>														

					Persentase Siswa SD miskin yang mendapatkan beasiswa miskin											Persentase Siswa SD miskin yang mendapatkan beasiswa miskin																	
					Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SD Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional											Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SD Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional																	
																Persentase sekolah penerima BOS																	
																Persentase sekolah penerima BOP																	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah jenis pengelolaan pendidikan sekolah dasar															1	0	0	2.0	1			
					Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Unit Sekolah Baru yang dibangun (SD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit Sekolah Baru yang dibangun (SD)																			1	0	0	2.0	0	1	
					Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Ruang kelas yang dibangun (SD)	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang kelas yang dibangun (SD)																			1	0	0	2.0	0	2	
					Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK FISIK)	Prasarana Belajar SD yang dibangun		Ruang kelas yang dibangun (SD) (DAK FISIK)																					1	0	0	2.0	0
					Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Ruang guru yang dibangun (SD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang guru yang dibangun (SD)																			1	0	0	2.0	0	3	
					Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK FISIK)	Prasarana Belajar SD yang dibangun		Ruang guru yang dibangun (SD) (DAK FISIK)																					1	0	0	2.0	0
					Peningkatan Akses Pendidikan	Pagar sekolah yang dibangun (SD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan	Pagar sekolah yang dibangun (SD)																			1	0	0	2.0	0	6	

			Dasar	Laboratorium yang dibangun (SD)	Utilitas Sekolah	Laboratorium yang dibangun (SD)															
				Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun (SD)			Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun (SD)														
				Taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun (SD)			Taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun (SD)														
				Sarana air bersih dan sanitary yang dibangun (SD)			Sarana air bersih dan sanitary yang dibangun (SD)														
				Ruang ibadah yang dibangun (SD)			Ruang ibadah yang dibangun (SD)														
				Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK FISIK)	Prasarana Belajar SD yang dibangun		Prasarana Belajar SD yang dibangun (DAK FISIK)														
				Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Perpustakaan yang dibangun (SD)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan yang dibangun (SD)														
				Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK FISIK)	Prasarana Belajar SD yang dibangun			Perpustakaan yang dibangun (SD) (DAK FISIK)								1	0	0	2.0	0	5
				Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	jumlah meubelair sekolah (SD) yang dibeli	Pengadaan Mebeluer Sekolah	jumlah meubelair sekolah (SD) yang dibeli														
				Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	jumlah sekolah yang mendapat peralatan dan media pendidikan (SD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah sekolah yang mendapat peralatan dan media pendidikan (SD)														
				Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK FISIK)	sarana belajar SD yang dibeli			sarana belajar SD yang dibeli													
				Pemberian Beasiswa Siswa SD (SPM Pendidikan)	Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi jenjang SD	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi jenjang SD														






																							1	0	0	2.0	2					
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 2 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																	1	0	2.0	2			
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 3 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																		1	0	2.0	2		
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 4 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																			1	0	2.0	2	
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 5 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																				1	0	2.0	2
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 6 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																				1	0	2.0	2
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 7 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																				1	0	2.0	2
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 8 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																				1	0	2.0	2
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 9 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																				1	0	2.0	2
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 10 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																				1	0	2.0	2
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 11 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																				1	0	2.0	2
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 12 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)																				1	0	2.0	2



						Pengelolaan Dana BOS di SDN 24 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 25 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 26 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 27 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 28 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 29 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 30 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 32 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 33 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 35 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 36 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	0	2,0	2	1

																		1	0 1	0 2	2.0 1	2 1	
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
																			1	0 1	0 2	2.0 1	2 1

														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
														1	0 1	0 2	2.0 1	2 1

												1	0	0	2.0	2					
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 60 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 61 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 62 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 63 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 64 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 65 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 66 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 67 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 68 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1
						Pengelolaan Dana BOS di SDN 69 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 1 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)						1	0	1	2	2.0	1	1

						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 2 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 3 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 4 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 5 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 6 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 7 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 8 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 9 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 10 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1



					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 20 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 21 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 22 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 23 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 24 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 25 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 26 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 27 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 28 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)							1	0 1	0 2	2.0 1	2 1



					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 40 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)					1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 41 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)					1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 42 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)					1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 43 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)					1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 44 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)					1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 45 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)					1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 46 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)					1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 47 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)					1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 48 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)					1	0 1	0 2	2.0 1	2 1

					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 49 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)									1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 50 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)									1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 51 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)									1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 52 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)									1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 53 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)									1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 54 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)									1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 55 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)									1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 56 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)									1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 57 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)									1	0 1	0 2	2.0 1	2 1

						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 58 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)											1	0 1	0 2	2.0 1	2 1	
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 60 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)												1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 61 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)												1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 62 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)												1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 63 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)												1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 64 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)												1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 65 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)												1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 66 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)												1	0 1	0 2	2.0 1	2 1
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 67 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)												1	0 1	0 2	2.0 1	2 1

					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 68 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)												1	0	0	2.0	2	1	1		
					Pengelolaan Dana BOS APBN di SDN 69 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)													1	0	0	2.0	2	1	1	
					PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S1/DIV								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik	1	1	0	2									
						Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SD Nilai diatas 70																						
						Persentase guru SD yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran																						
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan SD										1	1	0	2.0	1				
					Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah berkas perhitungan Penetapan Angka kredit yang dinilai	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah berkas perhitungan Penetapan Angka kredit yang dinilai														1	0	0	2.0	2	1	7
					Pengembangan Mutu PTK DIKDAS (SPM Pendidikan)	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK DIKDAS		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK DIKDAS																				



					Jumlah GTK DIKDAS yang menerima Insentif		Jumlah GTK SD yang menerima Insentif											
					PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DASAR					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP							
						Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SMP						Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SMP						
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP						
						Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A						Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A						
						Rata-rata nilai UN SMP						Rata-rata nilai UN SMP			1	0	0	
						Persentase Siswa SMP miskin yang mendapatkan beasiswa miskin						Persentase Siswa SMP miskin yang mendapatkan beasiswa miskin						
						Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SMP Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional						Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SMP Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional						



						Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Ruang guru yang dibangun (SMP)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang guru yang dibangun (SMP)									1	0 1	0 2	2.0 2	0 3	
						Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Prasarana belajar SMP yang dibangun		Ruang guru yang dibangun (SMP) (DAK FISIK)														
						Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Laboratorium yang dibangun (SMP)	Pembangunan Laboratorium	Laboratorium yang dibangun (SMP)									1	0 1	0 2	2.0 2	0 6	
						Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Prasarana belajar SMP yang dibangun		Laboratorium yang dibangun (SMP) (DAK FISIK)														
						Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Taman/lapangan upacara /fasilitas parkir yang dibangun (SMP)	Pembangunan Fasilitas Parkir	Taman/lapangan upacara /fasilitas parkir yang dibangun (SMP)									1	0 1	0 2	2.0 2	1 0	
						Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Perpustakaan yang dibangun (SMP)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan yang dibangun (SMP)														
						Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Prasarana belajar SMP yang dibangun		Perpustakaan yang dibangun (SMP) (DAK FISIK)										1	0 1	0 2	2.0 2	0 5

						Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun (SMP)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun (SMP)										1	0	0	2.0	0		
						Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Prasarana belajar SMP yang dibangun		Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun (SMP) (DAK FISIK)												1	0	2	0	
						Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	jumlah meubelair sekolah (SMP) yang dibeli	Pengadaan Mebeluer Sekolah	jumlah meubelair sekolah (SMP) yang dibeli												1	0	0	2.0	2
						Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	jumlah sekolah yang mendapat peralatan dan media pendidikan (SMP)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah sekolah yang mendapat peralatan dan media pendidikan (SMP)												1	0	0	2.0	3
						Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK FISIK)	sarana belajar SMP yang dibeli		sarana belajar SMP yang dibeli (DAK FISIK)													1	0	2	0
						Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Ruang SMP yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang penunjang sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (SMP) (DAK FISIK)												1	0	0	2.0	2
						Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Ruang SMP yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (SMP) (DAK FISIK)												1	0	0	2.0	1
						Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Ruang SMP yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (SMP) (DAK FISIK)												1	0	0	2.0	1

						Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	Ruang SMP yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium dan praktikum sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (SMP) (DAK FISIK)									1	0 1	0 2	2.0 2	1 8		
						Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang mengikuti pendampingan dan penguatan akreditasi SMP	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti pendampingan dan penguatan akreditasi SMP															
							Jumlah Sekolah Hijau, Ramah Anak dan Sekolah Sehat yang di Fasilitas (SMP)		Jumlah Sekolah Hijau, Ramah Anak dan Sekolah Sehat yang di Fasilitas (SMP)												1	0 1	0 2	2.0 2
						Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah peserta didik yang diterima jenjang SMP (siswa)		Jumlah peserta didik yang diterima jenjang SMP (siswa)															
						Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar	Jumlah pagar sekolah yang direhabilitasi (SMP)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pagar sekolah yang direhabilitasi (SMP)															
						Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar	Jumlah toilet/jamban yang direhabilitasi (SMP)		Jumlah toilet/jamban yang direhabilitasi (SMP)												1	0 1	0 2	2.0 2
						Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (SMP)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (SMP)															
						Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar	Jumlah ruang guru sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (SMP)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (SMP)															
						Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar	Jumlah laboratorium dan praktikum sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (SMP)	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium dan praktikum sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (SMP)															

															1	0 1	0 2	2.0 2	2 2
															1	0 1	0 2	2.0 2	3 6
															1	0 1	0 2	2.0 2	3 8



									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah jenis pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama											
						Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)								1	0 1	0 2	2.0 2	3 2
						Pengelolaan Dana BOS di SMPN 2 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)								1	0 1	0 2	2.0 2	3 2
						Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)								1	0 1	0 2	2.0 2	3 2
						Pengelolaan Dana BOS di SMPN 4 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)								1	0 1	0 2	2.0 2	3 2
						Pengelolaan Dana BOS di SMPN 5 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)								1	0 1	0 2	2.0 2	3 2
						Pengelolaan Dana BOS di SMPN 6 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)								1	0 1	0 2	2.0 2	3 2
						Pengelolaan Dana BOS di SMPN 7 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)								1	0 1	0 2	2.0 2	3 2
						Pengelolaan Dana BOS di SMPN 8 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)								1	0 1	0 2	2.0 2	3 2

													1	0	0	2.0	3	
						Pengelolaan Dana BOS di SMPN 9 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	2	2.0	3
						Pengelolaan Dana BOS di SMPN 10 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	2	2.0	3
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SMPN 1 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	2	2.0	3
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SMPN 2 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	2	2.0	3
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SMPN 3 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	2	2.0	3
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SMPN 4 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	2	2.0	3
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SMPN 5 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	2	2.0	3
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SMPN 6 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	2	2.0	3
						Pengelolaan Dana BOS APBN di SMPN 7 Pangkalpinang	Persentase Pengelolaan Dana BOS APBN selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)					1	0	2	2.0	3











						Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK FISIK)	Alat Permainan Edukatif	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa PAUD (DAK FISIK)											1	0 1	0 2	2.0 3	1 2			
						Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	jumlah berkas perhitungan Penetapan Angka kredit yang dinilai	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	jumlah berkas perhitungan Penetapan Angka kredit GTK PAUD yang dinilai													1	0 1	0 2	2.0 3	1 6	
						Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK FISIK)	Prasarana PAUD yang direhabilitasi		Prasarana PAUD yang direhabilitasi (DAK FISIK)																		
						Peningkatan Mutu Layanan Sarana PAUD dan PNF	Jumlah prasarana PAUD yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	- Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhabilitasi sedang/berat													1	0 1	0 2	2.0 3	0 3	
						Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK FISIK)	jumlah prasarana PAUD yang direhabilitasi		Jumlah prasarana PAUD yang direhabilitasi (DAK FISIK)																		
						Peningkatan Mutu Layanan Sarana PAUD dan PNF	Jumlah prasarana PAUD yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi sedang/berat													1	0 1	0 2	2.0 3	0 4	
							Jumlah sarana bermain PAUD yang direhabilitasi		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi sedang/berat																		
							Jumlah Taman/lapangan upacara / fasilitas parkir PAUD yang direhabilitasi																				
						Peningkatan Mutu Layanan Sarana PAUD dan PNF	Jumlah meubeleir PAUD yang dibeli	Pengadaan Meubeluer PAUD	Jumlah meubeleir PAUD yang dibeli														1	0 1	0 2	2.0 3	0 7

					Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang dibina	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang dibina									1	0 1	0 2	2.0 3	1 7			
					Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi										1	0 1	0 2	2.0 3	1 4		
				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman kurikulum	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman kurikulum	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman kurikulum																
				Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan parenting		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman penilaian PAUD		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman penilaian PAUD																
				jumlah pelaksanaan penilaian gugus berprestasi		jumlah jenis kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas anak usia dini		jumlah jenis kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas anak usia dini											1	0 1	0 2	2.0 3	1 3	
				Jumlah kelurahan yang mengikuti program BUNDA PAUD		Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan parenting		Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan parenting																
						jumlah pelaksanaan penilaian gugus berprestasi		jumlah pelaksanaan penilaian gugus berprestasi																

					Jumlah kelurahan yang mengikuti program BUNDA PAUD		Jumlah kelurahan yang mengikuti program BUNDA PAUD													
					<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S1/DIV  Persentase guru PAUD Formal yang memiliki sertifikat pendidik				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S1/DIV Persentase guru PAUD Formal yang memiliki sertifikat pendidik				1	0 1	0 2			
								Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah jenis pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)						1	0 1	0 2	2.0 3		
					Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (SPM Pendidikan)	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan								1	0 1	0 2	2.0 3	1 6
					Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (SPM Pendidikan)	Jumlah guru PAUD dan PNF yang menerima beasiswa S1, S2 dan S3 (orang)		Jumlah guru PAUD dan PNF yang menerima beasiswa S1, S2 dan S3 (orang)												

					Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (SPM Pendidikan)	jumlah dokumen analisis kebutuhan guru PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (dokumen)		jumlah dokumen analisis kebutuhan guru PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (dokumen)											
					Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (SPM Pendidikan)	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan terlatih (orang)		Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan terlatih (orang)											
					Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (SPM Pendidikan)	jumlah Guru PAUD dan PNF yang dapat mengikuti lomba pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan keningkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)		jumlah Guru PAUD dan PNF yang dapat mengikuti lomba pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan keningkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)											

					Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (SPM Pendidikan)	Jumlah Guru PAUD Formal berprestasi ketingkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)	Jumlah Guru PAUD Formal berprestasi ketingkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)																	
					Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (SPM Pendidikan)	Jumlah pelaku seni budaya yang mendapat pelatihan	Jumlah pelaku seni budaya yang mendapat pelatihan																	
					Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (SPM Pendidikan)	jumlah Calon Kepala Sekolah TK Negeri yang mengikuti diklat	jumlah Calon Kepala Sekolah TK Negeri yang mengikuti diklat																	
					Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan (SPM Pendidikan)	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kebudayaan yang memahami tentang seni dan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kebudayaan yang memahami tentang seni dan																	



					<b>PENDIDIKAN (BOP)</b>															
					Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOP selama 12 Bulan (%)														
					Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOP selama 12 Bulan (%)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase pengelolaan dana BOP selama 12 Bulan (%)												
					Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3 Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOP selama 12 Bulan (%)									1	0	0	2	2	1
					Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Tamansari Pangkalpinang	Persentase pengelolaan dana BOP selama 12 Bulan (%)									1	1	2	3	0	1





									<b>editasi</b>								
									<b>Jumlah dokumen kurikulum PNF</b>								
									<b>Angka Kelulusan Paket A</b>								
									<b>Angka Kelulusan Paket B</b>								
									<b>Angka Kelulusan Paket C</b>								
									Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Ke setaraan	Jumlah jenis pengelolaan pendidikan Non Formal/Ke setaraan							
														1	0 1	0 2	2. 0 4

						Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	jumlah berkas perhitungan Penetapan Angka kredit yang dinilai	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	jumlah berkas perhitungan Penetapan Angka kredit GTK Non Formal/kesetaraan yang dinilai											1	0	0	2	0	4	1	5			
						Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal	Sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal yang dibangun (Jenis)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dibangun (Jenis)																					
						Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal	jumlah dokumen informasi angka melek huruf dan PNF (dokumen)																1	0	0	2	0	4	0	2
						Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK FISIK)	jumlah prasarana belajar yang dibangun			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang dibangun																				

						Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang dibangun											1	01	02	204	01	
						Rehabilitasi Sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ter rehabilitasi sedang/berat												1	01	02	204	03
						Rehabilitasi Sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang ter rehabilitasi sedang/berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang ter rehabilitasi sedang/berat												1	01	02	204	04

						Pengadaa n Sarana Belajar SKB (DAK FISIK)	Jumlah Sarana belajar SKB yang dibeli	Pengadaan Perlengkap an Pendidikan Nonformal/ Kesetaraa n	Jumlah Perlengkap an Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang diadakan										1	0	0	2	2	0	0	9	
						Pengadaa n Sarana Belajar SKB (DAK FISIK)	jumlah Sarana belajar SKB yang dibeli	Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/ Kesetaraa n	Jumlah Mebeluer Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang diadakan											1	0	0	2	2	0	0	7
						Pengadaa n Sarana Belajar SKB (DAK FISIK)	jumlah Sarana belajar SKB yang dibeli	Pengadaaa n Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraa n	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang diadakan										1	0	0	2	2	0	0	1	1
						Peningkat an Mutu Layanan Sarana PAUD dan PNF	Jumlah meubelair PNF yang dibeli	Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/ Kesetaraa n	Jumlah Mebeluer Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang diadakan											1	0	0	2	2	0	0	7
						Peningkat an Mutu Layanan Pendidika n Non Formal	Jumlah lembaga pendidikan kursus yang dibina	Pembinaan Kelembaga an dan Manajeme n Sekolah Nonformal	Jumlah lembaga pendidikan kursus yang dibina											1	0	0	2	2	0	0	6

					Jumlah lembaga yang termonitring dalam Penggunaan BOP Kesetaraan	/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang termonitring dalam Penggunaan BOP Kesetaraan																
					Jumlah PKBM yang mendapat bantuan		Jumlah PKBM yang mendapat bantuan																
					Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga Non Formal yang terakreditasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Jumlah lembaga Non Formal yang terakreditasi										1	01	02	204	13	
					Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta terlatih dalam pendidikan kecakapan hidup	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Jumlah peserta terlatih dalam pendidikan kecakapan hidup											1	01	02	204	15
					Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti	Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah peserta yang mengikuti											1	01	02	204	12

					n Non Formal	Paket A setara SD	Nonformal /Kesetaraan	Paket A setara SD												
						Jumlah peserta yang mengikuti Paket B setara SMP		Jumlah peserta yang mengikuti Paket B setara SMP												
						Jumlah peserta yang mengikuti Paket C setara SMU		Jumlah peserta yang mengikuti Paket C setara SMU												
					Peningkatan fungsi pelayanan KBM di SKB Pangkalpinang	Jumlah siswa SKB Pangkalpinang yang mendapat pelayanan KBM		Jumlah siswa SKB Pangkalpinang yang mendapat pelayanan KBM												
					<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Jumlah upaya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang dilaksanakan</b>					<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia</b>								

								Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan									1	0	0	2.			
					Pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan	jumlah jenis buku profil pendidikan dan kebudayaan yang tersusun	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	jumlah jenis buku profil pendidikan dan kebudayaan yang tersusun																
						jumlah jenis buku saku pendidikan dan kebudayaan yang tersusun		jumlah jenis buku saku pendidikan dan kebudayaan yang tersusun												1	0	0	2.	0
						jumlah jenis buku Profil Pendidik dan		jumlah jenis buku Profil Pendidik dan																1

						Tenaga Kependidikan yang tersusun		Tenaga Kependidikan yang tersusun										
						Jumlah satuan pendidikan yang mendapat verifikasi dan validasi Data Pokok Pendidikan		jumlah satuan pendidikan yang mendapat verifikasi dan validasi Data Pokok Pendidikan										
						Jumlah dokumen laporan terkait angka melek huruf yang tersusun		jumlah dokumen laporan terkait angka melek huruf yang tersusun										
						Jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SD	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SD										
						Jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SMP		jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SMP					1	0 1	0 4	2. 0 1	0 2	

													WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2					
				KEBUDAYAAN								KEBUDAYAAN		2 2					
				PROGRAM PENGEMBANGAN  / PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN BUDAYA BENDA DAN TAK BENDA	Jumlah Seni dan Budaya yang dilestarikan							PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Seni dan Budaya yang dilestarikan	2	2 2	0 5			
				PROGRAM PENGEMBANGAN  / PELESTARIAN	Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan								Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan						

						RIAN DAN PERLIN DUNGA N CAGAR BUDAYA DAN PERMUS EUMAN, SENI BUDAYA / SEJARA H DAN TRADISI	an					rikan							
							Jumlah cagar budaya yang dilindung i					Jumlah cagar buday a yang dilindu ngi							
										Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	Jumlah jenis penetapan cagar budaya peringkat kabupaten /Kota				2	2	0	2. 0 1	
						Pencegaha n dan Penanggul angan dari Kerusakan, Kehancura n, atau Kemusnah an Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang mendapat pemelihara an								2	2	0	2. 0 1	0 2
						Register Cagar Budaya	jumlah Cagar Budaya yang terdaftar								2	2	0	2. 0 1	0 1

								dan ditingkatkan statusnya												
								jumlah Komunitas Pencinta Cagar Budaya yang dibentuk												
								jumlah jenis Lomba Cagar Budaya yang diselenggarakan							2	2	0	2	0	0
							Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah siswa yang mengenal cagar budaya (PAUD, SD dan SMP)							2	2	5	1	0	3
								Jumlah Workshop dan Sosialisasi Tentang Cagar Budaya												

								Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah izin yang terbit dalam tingkat Kota					2	2	0	2.	
							Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat						2	2	0	2.03	05
							Register Cagar Budaya	jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditingkatkan statusnya						2	2	0	2.03	01
							Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta	jumlah pelaksanaan pelestarian Kota Pusaka						2	2	0	2.03	03

						Pemanfaat annya													
					<b>PROGRA M PENGEM BANGAN / PELESTA RIAN DAN PERLIN DUNGA N BUDAYA BENDA DAN TAK BENDA</b>	Jumlah Cagar Budaya yang dilindung i				<b>PROGR AM PENGEL OLAAN PERMU SEUMA N</b>	Jumlah Cagar Budaya dan permu seuma n yang dilindu ngi				2	2	0	6	
									Pengelolaan Museum Kabupaten /Kota	Jumlah jenis pengelolaa n museum Kabupaten /Kota					2	2	0	2.0 1	
					Pengemb angan, Pelestaria n dan Perlindun gan Cagar Budaya dan Permuseu	jumlah jenis Lomba Cagar Budaya dan Permuseu man yang diselengga rakan	Peningkata n Akses Masyaraka t Terhadap Museum	jumlah jenis Lomba Permuseu man yang diselengga rakan							2	2	0	2.0 1	0 3

					man	Jumlah siswa yang mengenal cagar budaya dan museum (PAUD, SD dan SMP)	Jumlah siswa yang mengenal museum (PAUD, SD dan SMP)														
						Jumlah Workshop dan Sosialisasi Tentang Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Workshop dan Sosialisasi Tentang Permuseuman														
										<b>PROGR AM PENGE MBANG AN KESENI AN TRADIS IONAL</b>	<b>Jumlah keseni an tradisi onal yang dilindu ngi</b>				2	2	0	3			
											<b>Jumlah tempat pemertasan seni budaya</b>										
								Pembinaan Kesenian yang Masyarakat	Jumlah jenis pembinaan kesenian masyarakat						2	2	0	3	2.	0	1

								Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	t tingkat kota										
					Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah	Jumlah kreasi seni daerah yang dihasilkan melalui seniman masuk sekolah (SMS)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah kreasi seni daerah yang dihasilkan melalui seniman masuk sekolah (SMS)							2	2	0	2	0
					jumlah dewan kesenian kota pangkalpinang yang dibentuk dan aktif	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	jumlah dewan kesenian kota pangkalpinang yang dibentuk dan aktif							2	2	0	2	0	
										<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>				2	2	0			
										<b>Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota, provinsi dan nasional</b>									



					Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah	jumlah penggiat seni dan budaya yang mendapat bantuan	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	jumlah penggiat seni dan budaya yang mendapat bantuan						2	2	0	2	0	3	
					Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Festival Budaya Daerah yang diselenggarakan (Event)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Festival Budaya Daerah yang diselenggarakan (Event)												
					Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Gelar Seni Budaya yang diselenggarakan (Event)		Jumlah Gelar Seni Budaya yang diselenggarakan (Event)						2	2	0	2	2	0	1
						Jumlah Pentas Seni untuk menyambut tamu negara		Jumlah Pentas Seni untuk menyambut tamu negara												

				(kali)		(kali)													
				jumlah group Lomba Seni suara tingkat nasional yang diseleksi		jumlah group Lomba Seni suara tingkat nasional yang diseleksi													
				Jumlah peserta yang mengikuti pawai budaya dan gelar seni APEKSI		Jumlah peserta yang mengikuti pawai budaya dan gelar seni APEKSI													
				jumlah group seni musik tradisional yang lolos ke tingkat nasional		jumlah group seni musik tradisional yang lolos ke tingkat nasional													
				Terseleksi ya group seni tari tradisional ke tingkat nasional		Terseleksi ya group seni tari tradisional ke tingkat nasional													
				jumlah group seni teather tradisional yang majau ke		jumlah group seni teather tradisional yang majau ke													

						tingkat nasional		tingkat nasional																			
									Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah jenis pembinaan lembaga adat tingkat kota								2	2	0	2	2	0	3			
						Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi	jumlah lembaga adat melayu kota pangkalpinang yang dibentuk dan yang aktif	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	jumlah lembaga adat melayu kota pangkalpinang yang dibentuk dan yang aktif										2	2	0	2	2	0	3	0	2
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat											2	2	0	2	2	0	3	0	3
																			2	2	0	4					
									Pembinaan Sejarah Lokal	Jumlah pembinaan sejarah									2	2	0	4	2	0	1		



						rakan		rakan													
						Jumlah Data dan Informasi Sejarah dan Tradisi yang dikumpulkan		Jumlah Data dan Informasi Sejarah dan Tradisi yang dikumpulkan													
						Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi	jumlah Anggota Saka Widya Budaya Bakti yang mendapat pembinaan	jumlah Anggota Saka Widya Budaya Bakti yang mendapat pembinaan									2	2	0	2.01	02
						penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah															